

# GEREJA KATOLIK DALAM BAYANG-BAYANG KONFLIK PAPUA - JAKARTA

**MekiMulait**

*Universitas Katolik Parahyangan, Bandung*

---

## **Abstract**

The Catholic Church is not the only church and religion that carries out God's mission of integral human salvation in Papua. He is one of several churches and other religions that carry out the mission. Despite many shortcomings, the Church continues to be faithful in carrying out its mission. The conflict between the Indonesian government and the Papuan people who want the right of self-determination to take place since the 1960s until now has become a challenge for the Church to continue its mission consistently. Consistent Church attitudes must be seen in a position of defense against justice, truth and human safety. The from beginning when Papua began to flare up, the Catholic Church played a central axis role. This means that the Church does not support the "M" aspiration for the Papuan people and the way the Indonesian government defends Papua by force. The Catholic Church as a unifier with other churches and religions chooses the path of dialogue with the parties concerned to keep promoting and fighting for a peaceful Papua apart from carrying out the proclaiming of faith and human development in all aspects of life.

**Keywords:** *The Kingdom of God's mission, Konflik of Papua-Jakarta, Catholic Church, The tussle of Papuan*

## **Abstrak**

Gereja Katolik bukan hanya gereja dan agama yang menyampaikan misi Allah tentang penyelamatan manusia integral di Papua. Ia adalah salah satu dari bagian gereja-gereja dan agama-agama lain yang membawa misi. Meskipun banyak kekurangan, Gereja melanjutkan dengan setia misinya. Konflik di antara pemerintah Indonesia dan orang Papua yang menginginkan hak dari tujuan diri sudah terjadi sejak tahun 1960-an sampai sekarang menjadi sebuah tantangan untuk Gereja dalam melanjutkan misinya secara konsisten. Sikap-sikap Gereja yang konsisten harus dilihat dalam sebuah posisi pertahanan menghadapi keadilan, kebenaran dan keselamatan manusia. Dari awal ketika Papua mulai bergelora, Gereja Katolik memainkan peranan

sentral. Ini berarti bahwa Gereja tidak mendukung aspirasi “M” untuk orang Papua dan cara pemerintah Indonesia mempertahankan Papua dengan kekuatan. Gereja Katolik sebagai sebuah pemersatu dengan gereja-gereja dan agama-agama yang lain memilih jalur dialog dengan partai-partai yang berfokus untuk meningkatkan dan berperang untuk sebuah Papua yang damai terpisah dari penyelesaian tentang iman dan perkembangan manusia dalam semua aspek kehidupan.

**Kata-kata Kunci:** Misi Kerajaan Allah, Konflik Papua-Jakarta, Gereja Katolik, Pergumulan orang Papua.

---

---

## PENDAHULUAN

Konflik antara Jakarta yang diwakili oleh militer dan masyarakat Papua yang diwakili oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara kronologis berlangsung sejak tahun 1961 sampai saat ini. Selama masa pemerintahan presiden Soeharto, Papua didekati dan diatasi dengan pendekatan militer. Hampir 12 kali operasi militer atau dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM) ditetapkan dan dilakukan di Papua. Pendekatan militeristik ini membawa petaka kemanusiaan bagi orang Papua. Hampir ratusan ribu jiwa manusia Papua menjadi korban kekerasan militer.<sup>1</sup> Meskipun kemudian hari pemerintah pusat telah mencabut DOM setelah rezim Soeharto jatuh 1998, namun wajah kekerasan terus muncul di segala lini kehidupan sampai saat ini. Keteringgalan masyarakat Papua di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan bahkan kekerasan kemanusiaan yang terus dilakukan oleh pihak keamanan terhadap rakyat sipil merupakan wajah konflik sedang membara.

Dalam situasi konflik demikian, Gereja Katolik Papua terus mengupayakan terciptanya damai dan kerajaan Allah di bumi Cenderawasih. Berbagai upaya dapat dilakukan baik pelayanan internal maupun eksternal, di mana Gereja Katolik berperan membangun kerja sama dengan gereja maupun agama lain untuk bersama-sama memperjuangkan tercipta damai itu. Meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan, namun tidak sedikit kritik yang juga diterima oleh Gereja dari kedua belah pihak yang bertikai. Dari pihak militer sering mencurigai

---

1 Human Right melaporkan 100.000 jiwa manusia Papua menjadi korban kekerasan pasukan keamanan Indonesia baik sebelum diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) 1965-1997 maupun sesudah pencabutan DOM 1998-2004; Lihat Otmar Oehring, *Human Rights Droits l'Homme Menschenrechte*, Lembaga Misi Katolik Internasional Missio, 2009, hal. 7.

pimpinan Gereja yang menyuarakan (suara kenabian) terhadap korban kekerasan secara lantang dengan sikap curiga bahkan tuduhan bahwa itu merupakan wujud dukungan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebaliknya dari pihak OPM sering mencurigai bahkan menuduh para pimpinan Gereja sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menghancurkan perjuangan mereka hanya karena melakukan pembicaraan yang dialogis dalam menanggapi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh dua pihak yang sedang bertikai. Tuduhan semacam ini menimbulkan ambiguitas pandangan umat terhadap posisi Gereja. Apakah fungsi dan tugas Gereja sesungguhnya terhadap umat dalam situasi konflik demikian? Tentu, Gereja tidak dapat mendukung orang Papua yang menyuarakan hak penentuan nasib sendiri karena itu ada diranah politik yang menjadi domain para politisi. Selain itu, Gereja juga tidak akan membenarkan ataupun membiarkan kekerasan terus terjadi dan mengorbankan banyak orang Papua yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Gereja akan terus bersuara dalam kerangka pembelaan terhadap kasus kemanusiaan dengan mengambil jalan poros tengah.<sup>2</sup>

Dalam menjawab dua masalah kecurigaan terhadap Gereja di atas, penulis tidak bermaksud menguraikan ajaran sosial Gereja secara khusus dalam memberi pondasi penilaian umat terhadap persoalan sosial politik yang berakibat pada perjuangan Gereja membumikan Kerajaan Allah di bumi Cenderawasih. Penulis akan menggunakan dokumen Gereja sebagai alat penerang dalam menelusuri persoalan pelik yang sampai kini sulit diurai. Dengan dua sasaran sekaligus yakni memberikan penerangan iman dan pandangan terhadap domain Gereja dalam situasi pastoral demikian dan sekaligus menjadikan kritikan umat sebagai bahan evaluasi bagi Gereja untuk terus memperbaharui diri supaya misi pewartaan Kerajaan Allah sungguh nyata di mana Gereja sedang melaksanakan misi tersebut.

Oleh karena itu, urutan penulisannya seperti berikut: Bagian awal kami akan mulai dengan konsep Kerajaan Allah di mana Allah berkehendak membumikan Kerajaan-Nya dalam peristiwa inkarnasi supaya manusia dapat diselamatkan. Bagian kedua, kami mencoba memotret bagaimana upaya Gereja Katolik melaksanakan misi di Papua terutama saat dan sesudah pepera, 1969. Setelahnya kami akan menguraikan bagaimana Gereja melaksanakan misi keselamatan di daerah Otonomi Khusus dengan aneka ragam persoalan umat dan munculnya gerakan kaum muda Papua dengan tuntutan penentuan nasib sendiri tahun 2008-2017 sebagai sebuah tantangan pastoral yang perlu ditanggapi

---

2 A. Eddy Kristiyanto, *Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua*, Jakarta: Obor, 2017, hal. 266.

secara bijaksana oleh Gereja. Dan bagian akhir dari tulisan ini adalah penutup.

## Misi Kerajaan Allah

Seperti yang dikemukakan oleh John Fuellenbach bahwa ada tiga pendekatan dalam melihat apa itu Kerajaan Allah. Di mana masing-masing pendekatan berfokus pada aspek khusus tergantung dari awal titik pandang. Maka lebih bersifat saling melengkapi. Tiga pemahaman itu adalah Kerajaan Allah sebagai konsep, Kerajaan Allah sebagai simbol dan sebagai pembebasan. Namun Kerajaan Allah sebagai pembebasan mendapat tempat yang istimewa karena hampir pewartaan Yesus merupakan kisah pembebasan bahkan sebelum itu dalam kisah Umat Israel juga yang menjadi topik sentral adalah pembebasan.<sup>3</sup> Maka dalam pokok ini kami menitikberatkan Kerajaan Allah dalam pemahaman pembebasan Allah bagi manusia.

Sebegitu sentralnya misi Kerajaan Allah maka Widi Artanto, M.Th yang mengutip C.S. Song menegaskan sebenarnya misi Kerajaan Allah tidak dapat disejajarkan dengan tema atau corak misi Gereja lainnya karena misi Kerajaan Allah merupakan dasar atau sumber esensial dari misi Gereja. Hal ini untuk menghindari bahkan mengatasi kecenderungan "Gereja sentris" dalam pemahaman misi karena Gereja bukanlah Kerajaan Allah.<sup>4</sup> Bahkan dalam "Dasar Dasar Misiologi", Edmund Woga mengutip W. Beinert yang menegaskan bahwa Gereja pada dirinya sendiri tidak mempunyai misi karena Gereja hanya melaksanakan tugas panggilan Allah untuk ikut serta dalam misi Allah di dunia ini.<sup>5</sup> Hal yang sama ditegaskan oleh McBrien, Gereja ada bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan Kerajaan Allah.<sup>6</sup> Pannenberg malah lebih tegas mengatakan, Kristus mengarahkan Gereja kepada Kerajaan Allah yang mengatasi Gereja.<sup>7</sup> Maka Gereja baru menegaskan identitasnya kalau berperan aktif melakukan misi Allah dan misi itu adalah Kerajaan Allah. Karena Allah bermaksud memulihkan segala sesuatu di bawah pemerintahan-Nya kembali sehingga kesejahteraan, keadilan,

---

3 John Fuellenbach, *Kerajaan Allah: Pesan Inti Ajaran Yesus Bagi Dunia Modern*, Ende: Nusa Indah, 2006, hal. 76.

4 Dalam pemahaman eklesiologi yang lama "Gereja" mengidentikan diri dengan Kerajaan Allah, maka ketika melakukan misi evangelisasi "Gereja sentris" sangat terasa. Namun dalam perjalanan sejarah dan terutama melalui Konsili Vatikan II, Gereja ditempatkan sebagai sakramen tubuh mistik Kristus yang mewartakan dan menghadirkan Kerajaan Allah bagi keselamatan manusia (LG, 7; AD, 5,6,7,8).

5 Bdk. Edmund Woga, *Dasar Dasar Misiologi*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hal. 161.

6 R.P. McBrien, *Do We Need the Church*, New York: Harper & Row, 1969, hal. 98.

7 Pannenberg, *Theology and the Kingdom of God*, Philadelphia: Westminster, 1969, hal. 76-77.

perdamaian, kebenaran dan cinta kasih serta kebahagiaan dapat dialami oleh seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu, *Missio Dei* tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Allah atau pemerintahan Allah.<sup>8</sup>

Lalu apa isi dari misi Kerajaan Allah? Seperti yang digambarkan oleh Widi bahwa dalam Perjanjian Lama (PL) Allah atau Yahwe diakui sebagai raja tidak hanya dalam perayaan kultus tetapi juga dalam kehidupan sosial politis bangsa Israel. Hal ini dapat dilihat dari penghormatan bangsa Israel pada Allah sebagai raja yang digambarkan dalam Kitab Mazmur dan Kitab para Nabi dengan keyakinan bahwa Yahwe adalah pencipta langit dan bumi sesuai dengan pengakuan mereka. Misalnya pada Mzm 74 Yahwe sebagai raja menundukkan dan menguasai lautan dimana secara tradisional dianggap sebagai lambang kuasa kejahatan yang menghancurkan. Kerajaan Yahwe juga tidak terbatas pada bangsa Israel melainkan Raja alam semesta. Hal ini dapat diperkuat dengan ungkapan dalam Mzm 47: 2,3,9,10 dimana dalam ayat itu menegaskan bahwa kekuasaan Yahwe sebagai Raja atau tuan tidak hanya bagi bangsa Israel tetapi bagi semua bangsa bangsa di bumi.<sup>9</sup> Mardiatmadja dengan nada hati hati menegaskan pokok ini bahwa Kedaulatan Allah menyatakan tindakan Allah menguasai segala untuk menyelamatkan semua. Jadi bukan hanya sebagian. Dengan begitu Dia menjadi penyelamat dan diterima hak cipta-Nya (Yes 43:15; 44:6).<sup>10</sup>

### Misi Kerajaan Allah Melalui dan Dalam Yesus

Inti atau pokok pewartaan Yesus adalah Kerajaan Allah. Fuellenbach memberi gambaran cukup jelas bagaimana Allah melakukan misi kerajaan-Nya melalui Yesus. Menurutnya, Allah ingin mendirikan perjanjian secara definitif melalui Yesus. Kerajaan Allah itu datang ke dunia melalui diri-Nya sebagai kasih Allah yang tak terbatas untuk memenuhi janji yang disampaikan dahulu kala, janji untuk setiap pribadi

---

8 Mengenai istilah Kerajaan Allah dan Pemerintahan Allah menurut C.S. Song lebih tepat menggunakan pemerintahan Allah (*the Reign of God*) daripada Kerajaan Allah (*Kingdom of God*) karena menurutnya Kerajaan Allah tidak menunjuk kepada suatu kerajaan (a kingdom) atau wilayah (teritori). Kata bahasa Yunani *baseleia tou theou* yang diterjemahkan Kerajaan Allah tidak mengungkapkan dengan benar apa yang dimaksudkan Yesus dengan Pemerintahan Allah. Istilah Kerajaan Allah lebih mengandung arti wilayah nasional, sistem feodal dan struktur monarki atau suatu kultur otoriter; Lih. Choan S. Song, *Jesus & the Reign of God*. Minneapolis: Fortress Press, 1993, hal. 39-40.

9 Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner*, Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius, 1997, hal. 167-170; Bdk. John Fuellenbach, *Kerajaan Allah: Pesan Inti Ajaran Yesus Bagi Dunia Modern*, Ende: Nusa Indah, 2006, hal. 46-48.

10 Lih. B.S. Mardiatmadja, Mardiatmadja, *Eklesiologi Makna dan Sejarahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1986, hal. 66.

dan seluruh ciptaan.<sup>11</sup> Pengutusan Yesus oleh Allah juga ditegaskan oleh Woga bahwa setiap penginjil termasuk Paulus dengan caranya sendiri melihat keberadaan Yesus sebagai “utusan” Allah yakni agen-Nya yang datang ke dunia untuk memenuhi janji mesianis-Nya.<sup>12</sup> Misi perutusan ini secara lebih tegas terlihat dalam Injil Lukas pada penampilan pertama Yesus di Nasaret:

Roh Tuhan ada pada Ku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi Aku untuk membebaskan orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang (Luk 4:18-19).

Yesus tidak hanyaewartakan tentang Kerajaan Allah tetapi juga memperlihatkan datangnya Kerajaan Allah yang tidak lain adalah diri-Nya. Fuellenbach dengan bahasa simbolis memberi arti misi Kerajaan Allah yang membumi dalam pribadi Yesus. Yesus digambarkan sebagai hadiah pemberian Kerajaan dari Allah. Yesus adalah Kerajaan yang mempribadi “*outo baseleia*” atau seperti dalam pandangan Origenes salah seorang bapa Gereja “Yesus adalah Kerajaan Allah yang menyatu dalam satu Pribadi.”<sup>13</sup> Teolog pembebasan, Leonardo Boff dalam pengertian yang lebih luas menegaskan bahwa Kerajaan Allah tidak boleh dipersempit ke dalam aspek-aspek tertentu, Kerajaan Allah itu menyangkut keseluruhan: dunia, manusia dan masyarakat. Keseluruhan kenyataan diubah melalui campur tangan Allah. Karena itu Kristus mengatakan: “Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan: lihat ia ada di sini atau di sana, sebab sesungguhnya Kerajaan Allah ada diantara kamu yang merujuk pada diri-Nya.”<sup>14</sup>

Selain memberi afirmasi soal perutusan-Nya oleh Bapa terkait misi, Yohanes Paulus II menekankan soal identifikasi Yesus sebagai hadirnya Kerajaan Allah:

Perancangan dan pendirian Kerajaan Allah adalah tujuan perutusan Yesus: “Untuk itulah Aku diutus” (Luk 4:43). Tetapi bukan seluruhnya demikian. Yesus sendiri adalah “kabar baik” seperti yang Ia nyatakan di Sinagoga Nasaret pada awal perutusan-Nya, ketika Ia menempatkan diri-Nya kata-kata Yesaya tentang Yang Terurapi oleh Roh Kudus (Luk 4:14-21). Karena “kabar baik” itu adalah Kristus, maka ada identifikasi warta dengan si pewarta, antara ucapan, perbuatan dan keberadaan. Kekuatan Yesus, rahasia keberhasilan tindakan-Nya terletak pada identifikasi diri yang penuh dengan warta yang Ia sampaikan. Iaewartakan “kabar baik” bukan cuma dengan apa yang Ia katakan atau yang Ia buat, tetapi dengan keberadaan-Nya.<sup>15</sup>

---

11 Lih. Fuellenbach, 2006, hal. 304

12 Lih. Woga, 2002, hal. 80

13 Lih. Fuellenbach, 2006, hal. 304.

14 Lih. Leonardo Boff, *Yesus Kristus Pembebas*, Ende: Alnoldus, 1999, hal. 54.

15 John Paul II, *Redemptoris Missio*, 13; Bdk. LG, 5.

## GEREJA SEBAGAI SAKRAMEN KESELAMATAN

### Pergeseran Pemahaman Gereja

Pemahaman Gereja sebagai sakramen keselamatan rupanya cukup kuat dipengaruhi oleh misi keselamatan Allah bagi manusia. Itulah sebabnya dalam sejarah perkembangan eklesiologi kita mengenal beragam sebutan dan pemaknaan Gereja (LG,6). Bahkan menurut Tom Jakobs tujuan pastoral Konsili Vatikan II pun adalah pembaharuan Gereja, pewartaan Injil di seluruh dunia dan dialog dengan dunia Modern (PO, 12).<sup>16</sup> Avery Dulles dalam "Model model Gereja"<sup>17</sup> memperlihatkan dengan jelas dimana perkembangan dua dari lima model Gereja (institusi, persekutuan mistik, sakramen, pewarta dan hamba) yang ditampilkan sebelumnya sudah diperlihatkan adanya ketegangan antara pandangan tentang Gereja yang bersifat institusional dan yang mistik sebelum akhirnya masuk pada rumusan sakramen. Model institusional nampaknya menyangkal adanya keselamatan bagi mereka yang tidak termasuk anggota dalam suatu organisasi, sedangkan model persekutuan tubuh mistik tetap menganggapnya sebagai soal apakah sungguh perlu orang diundang masuk anggota dalam suatu organisasi. Untuk dapat mempersatukan aspek aspek batiniah itu ke dalam suatu sintesis yang bisa dipahami, banyak teolog Katolik abad ke-20 mengambil konsep tentang Gereja sebagai sakramen. Dan tipe ekslesiologi ini menurut Dulles memang sudah lebih awal dikemukakan oleh Cyprianus, Agustinus, Thomas Aquinas dan Scheeben.<sup>18</sup>

Menanggapi gejala itu, sudah sejak tahun 1949 takhta suci memang telah mengutarakan dalam sepucuk surat tentang kemungkinan keselamatan tanpa adanya keanggotaan nyata di dalam Gereja bahwa seperti sakramen permandian, Gereja juga adalah suatu bantuan umum kepada keselamatan. Namun, takhta suci tidak melangkah sekian jauh sampai secara terang-terangan menyebut Gereja sebagai sebuah Sakramen. Akan tetapi, vatikan II mengambil langkah ini secara jelas dan tegas. Dalam konstitusinya tentang Gereja artikel pertama menjelaskan bahwa berdasarkan hubungannya dengan Kristus, Gereja adalah sejenis sakramen persatuan erat dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia, yakni bahwa Gereja merupakan tanda dan sarana dari kesatuan dan persatuan itu. Gagasan tentang Gereja sebagai sakramen dasar berulang kali muncul dalam banyak bagian pokok dari

---

16 Lih. Tom Jakobs, *Gereja Menurut Vatikan II*, Yogyakarta:Kanisius, 1987, hal. 11.

17 Lih. Avery Dulles, *Model Model Gereja*, Yogyakarta:Kanisius, 1990, hal. 60-70.

18 Untuk penjelasan ini, Dulles mengacu pada teolog teolog kuno dan modern karya P.Smolders, *L'Eglise de Vatikan II*, 1967, Vol. 2, 313-338.

dokumen-dokumen Vatikan II, misalnya LG, 9,46; SC, 26; AD, 5; GS, 42.<sup>19</sup>

## Gereja Sebagai Sakramen

Istilah “Gereja sebagai sakramen” menurut Martasudjita tidak terdapat dalam Kitab Suci. Ungkapan ini menjadi istilah teknis teologis, baru mulai abad XIX dan diajarkan secara resmi dalam Konsili Vatikan II (1962-1965). Dan rumusan “Gereja sebagai Sakramen” tidak semudah yang dibayangkan dan dipahami sekarang. Rumusan ini muncul setelah perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan dalam Konsili Vatikan II sendiri masih ragu-ragu menggunakan istilah “Gereja sebagai sakramen” karena dalam sidang para bapa Gereja masih pro kontra terkait istilah tersebut. Sebagai jalan kompromis Konsili Suci, menggunakan istilah “bagaikan” sakramen (Latin: *veluti sacramentum*). Meskipun demikian pemahaman ini sesungguhnya sudah diungkapkan secara simbolis dalam teologi bapa bapa Gereja yang pada zamannya dipengaruhi kuat oleh alam pikir Platonis. Misalnya sebutan Gereja sebagai misteri kosmik Gereja pada tulisan *Didache* pada pertengahan abad kedua dan Gereja sebagai *sacramentum unitatis* oleh Siprianus dari Gereja Latin.<sup>20</sup>

Seperti sedikit disinggung pada pokok mengenai kaitan antara Kerajaan Allah dan Gereja bahwa pada dirinya Gereja tidak mengadakan misi sebaliknya Misi Kristus mengadakan Gereja. Maka Gereja sebagai sakramen dapat dilihat dalam kaitan dengan misi Allah bagi keselamatan manusia melalui dan dalam Yesus Kristus. Menurut Martasudjita dalam konteks Gereja yang diutus menjadi saksi Yesus Kristus itulah sebabnya Gereja adalah sakramen Yesus Kristus. Gereja sebagai sakramen Yesus Kristus berarti bahwa Gereja adalah simbol real yang menghadirkan Yesus Kristus sendiri beserta seluruh karya penebusan-Nya bagi dunia. Maka yang penting disini yang menjadi penyelamat itu bukan gereja tetapi Yesus Kristus sendiri. Gereja membantu orang-orang zaman ini untuk mengenal dan berelasi dengan Yesus Kristus itu secara terjamin.<sup>21</sup> Bahkan dengan tantangan dunia dewasa ini terutama terkait perubahan-perubahan yang sangat cepat, Gereja mesti lebih sigap menanggapi itu sehingga kebenaran yang diwahyukan dapat ditangkap secara mendalam, dipahami semakin baik dan disajikan dengan cara yang sesuai.<sup>22</sup>

---

19 Jakobs, 1987, hal. 12-16.

20 Lih. E. Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2003, hal. 90-97; Bdk: Jacobs, *Ibid.*, hal. 13-14.

21 Martasudjita, 2003, hal. 84; Bdk. LG, 7, 8

22 Lih. Dulles, 1985, hal. 101.

## GEREJAKATOLIKDIPAPUA

### Gereja Periode Misi

Perintah-Nya kepada mereka; “Karena itu Pergilah jadikanlah semua bangsa murid-Ku (Yoh 20:21) dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus” (Mat 28:19). Demikianlah amanat agung Yesus Kristus yang mendorong Gereja melakukan misi evangelisasi ke seluruh dunia termasuk di Papua (AD, 5). Pada abad 15 ketika dunia Eropa menemukan dunia baru (Amerika, Afrika dan Asia) mulai mengarahkan diri dengan semangat imperealisme dan Gereja Katolik mulai berhasrat untuk bermisi ke dunia baru itu. Untuk tujuan misi, Gereja kemudian membentuk *propaganda Fidei* oleh Paus Gregorius XV (1564-1627) pada tahun 1622<sup>23</sup> meskipun agak terlambat dari pada gereja protestan yang lebih agresif dalam bermisi. Dua perhatian besar gerakan pada abad ini adalah penyelamatan jiwa-jiwa dan mendirikan gereja lokal (Keuskupan). Semangat yang dikobarkan misi pada masa ini adalah membawa sebanyak mungkin orang-orang kafir ke dalam Gereja sebagai satu satunya bahtera keselamatan (AD,1, 6). Baptisan dipahami sebagai ritus masuknya orang-orang kafir menjadi anggota Gereja tanpa pendampingan dan bimbingan katekumenat. Pandangan tentang eklesiologi ini dengan amat baik dikembangkan oleh Richard McBrien sebagai berikut: “misi Gereja adalahewartakan sabda Allah ke seluruh dunia. Gereja tidak perlu menganggap diri bertanggungjawab bila orang tidak menerimanya sebagai sabda Allah, namun Gereja harusewartakan sabda itu dengan jujur dan tekun. Semua yang lain bersifat sekunder belaka.”<sup>24</sup>

Sementara kegiatan misi Gereja Katolik di Papua sendiri baru pada dekade (1894-1959) ketika Pater Cornelis Le Cocq d’ Armandville, SJ menjajaki pertama kalinya ke pantai barat Papua, Doberai pada 22 Mei 1894.<sup>25</sup> Tantangan paling berat dihadapi oleh pemula misi di Papua ini tentu saja medan yang berat dan karakter manusia Papua yang masih alami. Jan Sloot dalam karya sejarah “Fransiskan Masuk Papua Jilid I” memberikan gambaran tantangan yang membuat karya misi di Papua jauh kurang berhasil demikian:

Keadaan wilayah itu seperti cuaca dan hutan belantara yang tak terhembus

---

23 Bdk. Kristiyanto,2004, hal. 183.

24 Lih. R.P. McBrien, 1970, hal. 11.

25 Dikutip dari Tesis Severinus S. Dau, *Proses Tarnasformatif Misi di Keuskupan Manokwari-Sorong:Refleksi Sejarah demi Menggagas Peluang*, 2013 yang menyadur dari karya Haripranata, P.H. SJ (1967), *Ichitisar Kronologis Sedjarah Geredja Katolik Irian Barat Djilid I-III.*, Lihat juga Jan Sloot, 2012, hal. 44; Bdk. P. J. Drooglevers, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal. 55.

sangatlah tidak bersahabat juga penduduknya sedikit saja yang berminat untuk mengganti pandangan hidup mereka dengan pandangan hidup Kristen. Terutama budaya mengayau merupakan masalah yang besar. Membutuhkan waktu lama sebelum pemerintah Belanda mulai mengatur hal ini.<sup>26</sup>

Tantangan lain yang tidak kalah beratnya adalah dari tetangga pewarta Injil yakni *Zending*. *Zending* yang lebih dulu lima puluh tahun sebelum misi (1855-1894) merasa lebih menguasai, maka para pewarta misi dapat hati-hati dengan wilayah yang sudah dimasuki oleh *Zending*. Hal ini jika tidak hati-hati maka dapat saja menjadi halangan dari tujuan misi itu sendiri karena *Zending* dapat dibekap kuat oleh pemerintah Hindia-Belanda. Bahkan pemerintah Belanda sendiri membuat aturan dalam kaitan dengan kegiatan misi dan *zending*.<sup>27</sup>

Sementara itu, tantangan dari situasi politik pada masa awal misi ini belum kuat karena pergolakan tuntutan Papua Merdeka (OPM) baru muncul tahun 1962 ketika kekuasaan atas wilayah Papua diserahkan kepada UNTEA untuk periode enam bulan berdasarkan *New York Agreement* (15 Agustus 1962) dan selanjutnya UNTEA menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia dengan tugas selambat lambatnya dalam waktu enam tahun mempersiapkan *Act of Free Choice* apakah rakyat Papua berkeinginan untuk merdeka atau berintegrasi dengan Indonesia. Desas desus munculnya konflik memang sudah dimulai ketika Indonesia memberikan reaksi atas deklarasi kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 oleh Komite Nasional Papua (KNP) di Jayapura atas persetujuan pemerintah Belanda. Dalam deklarasi itu dikibarkan bendera Papua Barat dan bendera Belanda serta menyanyikan lagu "Hai Tanahku Papua" dan lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Merasa ada gerakan nyata pembentukan negara Papua Barat, presiden Soekarno mendorong gerakan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) dengan argumen menolak pembentukan "negara boneka" Belanda di Irian Barat.<sup>28</sup> Meskipun pemerintah Indonesia menganggap itu sebagai boneka atau akal akalan kolonial Belanda untuk mempertahankan Papua dalam kekuasaannya, namun orang Papua sampai saat ini masih menganggap itu adalah hari proklamasi kemerdekaannya. Maka setiap 1 Desember orang Papua yang pro merdeka baik dalam negeri (terutama OPM yang bergerylia di hutan) maupun yang ada di pengasingan (di luar negeri) selalu memperingatinya sebagai hari proklamasi kemerdekaan dengan upara bendera Bintang Fajar.

Memang buku-buku sejarah Indonesia memperlihatkan terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Papua antara Belanda yang menguasai

---

26 Sejarah dan karya misi di Papua diambil dari Jan Sloot, *Fransiskan Masuk Papua Jilid I: Periode Pemerintahan Belanda 1937-1962*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2012, hal. 1937-1962.

27 Sloot, 2012, hal. 47-55, 148.

Papua Barat pada abad XIX (1828-1962) kemudian ditengah dalam waktu itu oleh Jepang selama tiga tahun (1942-1945) lalu oleh NICA (1947-1961) dan UNTEA (1962-1963)<sup>29</sup> dan Indonesia sendiri (1963 hingga kini). Namun pergantian kekuasaan tidak berpengaruh kuat pada pelanggaran HAM berat sebagaimana yang terjadi pada periode kekuasaan ditangan pemerintah Indonesia.<sup>30</sup> Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pelanggaran HAM berat yang terjadi kesemuanya dibawah pengawasan dan kendali pemerintah Indonesia terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang cukup otoriter selama 35 tahun sebelum kemudian terlangser pada tahun 1998. Pelanggaran HAM yang cukup menggelitik terjadi ketika periode transisi dimana pemerintah Indonesia memasukan ribuan aparat keamanan dan petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua “memilih” bergabung dengan NKRI. Akibatnya terjadilah intimidasi, penangkapan dan penahanan serta pembunuhan diluar hukum dan kemanusiaan.<sup>31</sup>

Lalu apa dan bagaimana tanggapan para pimpinan Gereja Katolik Papua dan dampaknya bagi misi Gereja pada saat itu? Seperti yang diungkapkan oleh Eddy Kristiyanto, OFM sejarawan gereja bahwa menjelang dan setelah Pepera (penentuan pendapat Rakyat) para pimpinan Gereja Katolik bersikap “netral”. Sikap para pimpinan Gereja kemudian berubah dan memberi dukungan penuh terhadap proses integrasi Papua ke dalam NKRI meskipun disatu sisi melukai hati masyarakat asli Papua yang telah berbisik untuk menyuarakan isi hati mereka. Para Uskup memilih bersikap demikian dengan tiga alasan. *Pertama*, karena mereka sebagian besar misionaris berwarga negara lain (asing). *Kedua* karena mereka berpegang kepada surat pernyataan MAWI yang ditandatangani oleh Justinus Kardinal Darmojuwono (surat pernyataan MAWI tentang masalah Irian Barat, Sangkalputung Klaten 24 Oktober 1968). *Ketiga*, karena Gereja Katolik mempunyai sifat Uni-

---

28 Lih. dalam karya Suryawan, I Ngurah, *Jiwa Yang Patah*, Manokwari, PUSBADAYA Universitas Negeri Papua, hal.87.

29 Bdk. Drooglevers, 2010, hal. 620-630.

30 Human Raigh dalam laporan penelitian kasus pelanggaran HAM Papua sejak 1965 mengidentifikasi 9 kasus pelanggaran HAM berat melalui operasi militer sebelum pemerintah mencabut DOM pada 1998 dan 3 kasus operasi militer sesudah pencabutan DOM. Korban diperkirakan lebih dari 100.000 orang Papua. Korban ini belum terhitung yang mengalami penyiksaan fisik, pembakaran rumah dan pengusian, Lih. Otmar Oehring, 2009, hal. 5-7.

31 P.J. Drooglevers dalam penelitiannya yang diberi judul, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, memberikan gambaran yang cukup jelas bagaimana pemerintah Indonesia memasukan ribuan pasukan tentara yang kemudian melakukan tindakan yang semena mena, menahan bahkan membunuh masyarakat Papua yang dicurigai tidak sejalan dengan rancangan pemerintah Indonesia terkait pemungutan suara, Lih. Drooglevers, 2010, hal. 511, 517-520.

versal dan Internasional.<sup>32</sup> Ketiga alasan yang sesungguhnya cukup mengecewakan kerinduan hak politik masyarakat Papua hanya bisa dimengerti ketika kita memahami tekanan yang kuat pada saat itu dimana Papua berwajah militeristik. Dan tentu saja para pimpinan Gereja bersikap hati-hati terhadap ancaman negara pada misi yang tergolong muda. Mereka tidak mau kehilangan lahan misi hanya karena dukungan politik terhadap masyarakat Papua. Alasan kedua juga tampaknya demi kepentingan umat Katolik secara nasional dimana posisi Katolik minoritas dalam negara kesatuan RI. Maka tentu para uskup Indonesia, MAWI lebih memprioritaskan posisi Katolik secara nasional daripada hak politik masyarakat Papua dan juga tentu demi keamanan masyarakat Papua sendiri. Alasan terakhir ini yang sedikit mengecewakan masyarakat Papua atas hak politiknya. Keberadaan posisi Gereja Katolik secara universal dan Internasional mestinya menjadi kekuatan Gereja dalam membela masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan.<sup>33</sup> Gereja mestinya bisa memainkan perannya ditingkat Internasional seperti yang dilakukan oleh Mgr. Soegijapranata, SJ (uskup pribumi pertama Indonesia) ketika masyarakat Indonesia mengalami penindasan dari kekuatan kolonialisme dan mengungkapkan hak politiknya ditingkat Internasional.<sup>34</sup> Kalau saja masyarakat Papua ketika itu hak politiknya diakui dan mendapatkan hak penentuan nasib sendiri maka kekerasan kemanusiaan yang menimpa masyarakat Papua pada periode berikutnya hingga saat ini bagai benang kusut yang tak dapat diurai dapat teratasi sejak lima puluh tahun lalu.<sup>35</sup>

---

32 Situasi dilematis yang dihadapi Gereja Katolik Papua ketika menghadapi kenyataan antar keinginan orang Papua atas hak penentuan nasib sendiri di satu sisi dan pemerintah Indonesia berupaya memasukan Papua dengan "paksa" ke dalam NKRI di sisi lain dapat dilihat dalam A. Eddy Kristiyanto OFM, *Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua*, 2017, hal. 124.

33 Tuntutan masyarakat Papua atas sikap MAWI seperti itu wajar saja karena pada kasus TimorTimur ketika puluhan bahkan ratusan anak dibunuh oleh tentara Indonesia, KWI oleh Romo Magnis Suseno dikatakan cepat cepat membuat pernyataan yang membuat dirinya marah. Namun setelah dikirim surat protes kepada pihak KWI lantas dibuat pertemuan susulan dan kemudian dikirim Romo Alfons Suhardi ke Dili untuk mencari informasi. Hasilnya seminggu kemudian terbit pernyataan KWI yang ditulis oleh Kardinal Julius Darmaatjadma, SJ yang kemudian mendapat perhatian Internasional; Lih. Frans Magnis Suseno, *Iman dan Hati Nurani: Gereja Berhadapan dengan Tantangan Tantangan Zaman*, Jakarta: Obor, 2014, hal. 90-91.

34 Peran besar yang dilakukan Mgr. Soegijapranata, SJ dalam memperjuangkan nasib rakyat Indonesia yang ditindas oleh kekuatan kolonialisme dapat diuraikan dengan cukup jelas oleh G. Budi Subanar SJ, *Kilasan Kisah Soegijapranata*, 2012, hal. 35-49. Di lihat juga dalam, Anhar Gonggong, *Mgr. Albertus Soegijapranata Antara Gereja dan Negara*, 1993.

35 Hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua memang sudah terlaksana tahun 1969 ketika PBB mengeluarkan resolusi penentuan nasib sendiri bagi masyarakat asli dan secara hukum Internasional orang Papua dinyatakan memilih bergabung dengan NKRI. Namun orang Papua tidak menerima hasil pemungutan suara karena dinilai tidak sesuai dengan

## Gereja Partikular

Dekrit tentang kegiatan misioner Gereja pada artikel pertama memberikan gambaran yang jelas akan tugas perutusan Gereja. Dekrit tersebut merumuskan demikian: Kepada para bangsa Gereja diutus oleh Allah untuk menjadi sakramen universal keselamatan (bdk. LG,48). Untuk memenuhi tuntutan hakiki sifat Katoliknya, menaati perintah pendiri-Nya (Mrk 16:16) Gereja sungguh sungguh mewartakan Injil kepada semua orang. Sebab para Rasul sendiri yang menjadi dasar bagi Gereja, mengikuti jejak Kristus “mewartakan sabda Kebenaran dan melahirkan Gereja-Gereja” (AD,1). Meskipun sasaran misi pada abad 21 ini sudah mulai terjadi pergeseran terutama dari segi metodologinya (pewartaan, dialog, pengajaran, kesaksian) dari pada misi pada abad 15 dimana sasaran utama adalah penyelamatan jiwa-jiwa<sup>36</sup> dan tindakan praktisnya adalah membaptis sebanyak mungkin orang yang masih kafir ke dalam Gereja Katolik sebagai anggota Gereja karena itulah satu satunya jalan keselamatan. Meskipun metode pewartaan dapat mengalami perubahan, namun pesan pewartaan Injil dan penyelamatan jiwa jiwa tetap sama di segala zaman. Seperti yang ditegaskan dalam dekrit “Ad Gentes” bahwa tugas itu satu dan tetap sama di mana pun juga dalam segala situasi meskipun dalam kenyataan tidak dilaksanakan dengan carayangsama (AD,6).

Gereja lokal di Papua secara hirarkis didirikan pada 3 Desember 1966 dimana Vikariat Apostolik Merauke ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Merauke, Vikariat Apostolik Soekarnopura ditingkatkan menjadi Keuskupan Soekarnopura dan Prefektur Apostolik Manokwari ditingkatkan menjadi Keuskupan Manokwari<sup>37</sup>. Pada dekade ini memperlihatkan posisi Gereja yang cukup dilematis atas sikap

---

mekanisme Internasional *one man one vote* bahkan ketika pemungutan suara berlangsung ada ancaman dari militer Indonesia yang membuat orang Papua tidak memilih secara bebas (Drooglevers, 2010, hal. 513-516). Hasil dan mekanisme pemungutan suara dengan cara Indonesia pun kemudian menjadi perdebatan di sidang umum PBB di mana pada putaran pertama 60 negara menolak, 15 negara memberikan suara dan 39 suara abstain. Namun pada putaran kedua atas usulan bersama antara Indonesia dan Belanda akhirnya 84 suara pro, dan tidak ada suara yang menentang namun 30 negara yang abstain. Itu artinya kecacatan pemungutan suara belum selesai secara tuntas. Oleh karenanya, orang Papua sampai saat ini melakukan perlawanan dengan cara-cara damai untuk penentuan nasib sendiri (Drooglevers,2010, hal. 767).

36 Metode pewartaan yang digunakan saat misi di Papua berdasarkan tujuan misi adalah mereka mencoba mempertobatkan orang-orang “kafir” secara orang per orang melalui sekolah dan pengajaran agama dari guru. Meskipun demikian pengaruh aliran misiologi yang baru mulai tampak di sini. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pada umumnya yang dapat dikatakan misiologi sampai tahun dua puluhan dari abad yang lalu pertama tama mengarahkan diri pada pertobatan orang orang “kafir” tanpa memberi banyak perhatian pada dunia dan pandangan hidup mereka, Lih. Sloot, 2012, hal. 109-111.

37 Dau, 2013, hal. 71;Bdk.Sloot, 2012, hal. 143-144.

mendukung proses integrasi Papua ke dalam NKRI melalui Pepera 1969 di satu pihak dan melukai hati orang asli Papua yang menginginkan akan penentuan nasib sendiri dipihak yang lain. Seperti yang dikisahkan romo Eddy terkait sikap Gereja sendiri terhadap Pepera bahwa “niat hati seluruh warga masyarakat Papua untuk bersedia ikut serta bekerja sama melaksanakan pembangunan Indonesia, namun para pemimpin Rohani itu pun tidak menyembunyikan kekuatiran mengenai perkembangan selanjutnya di Papua”.<sup>38</sup> Hal ini dapat diperkuat dari kesaksian akan kata kata yang dapat menyinggung dan melukai hati dan perasaan yang sangat terpuak oleh para imam pembantu para Uskup dalam pergaulannya sehari hari dengan hampir semua warga akar rumput. Inilah sebabnya orang asli Papua Katolik meskipun memiliki keyakinan (iman) kekatholikan yang kuat, namun merasa diberdayai oleh Gereja Katolik sendiri ke tangan pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih menganggap penjajah oleh karena berbagai fakta kejahatan kemanusiaan sejak 1962 sampai saat ini.<sup>39</sup> Ini oleh orang Papua menganggap semacam fakta penghianatan dalam wajah Gereja sendiri meskipun situasi Gereja saat itu sulit dibawah tekanan pemerintah Indonesia yang baru merebut kekuasaan dari tangan Belanda. Itulah sebabnya tidak terlalu asing kalau kemudian ada suara-suara akar rumput terhadap Gereja Katolik untuk juga turut membicarakan nasib mereka sebagai tebusan dosa lama. Karena persis disinilah akar persoalan kejahatan kemanusiaan yang menimpa orang Papua sampai saat ini, dimana Gereja Katolik dituduh tidak berpihak kepada keadilan, kebenaran dan nilai nilai Injil yang Gereja sendiri menjunjung dan memperjuangkannya. Sikap para pimpina Gereja yang tergabung dalam MAWI tidak memuaskan harapan orang Papua karena memutuskan untuk tidak mengeluarkan suara setelah bergulat lama dengan mengikuti suara hati nurani. Para wali Gereja memilih bersikap demikian demi menghindari timbulnya kesalah pahaman yang barangkali dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi masyarakat Papua.<sup>40</sup>

---

38 Eddy, 2017, hal. 251; Bdk.Sloot, 2012, hal. 146-147.

39 Indikator penjajahan terhadap suatu bangsa adalah pembunuhan masal dengan dalil penumpasan separatisme. Selain itu juga terkait penahanan dan pembunuhan secara masif dan sistematis tanpa proses hukum. Papua telah dan sedang mengalami situasi ini di mana sejumlah kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM sampai saat ini jarang diproses hukum dengan berbagai alasan bahwa pelaku tidak cukup bukti padahal dilapangan ditemukan pihak keamanan adalah aktornya. 12 kasus operasi militer maupun setelah Otonomi Khusus (2001) seperti kasus HAM di Wasior (2001), Wamena berdarah (2003), dan Puncak Jaya (2004) bahkan yang terbaru adalah kasus Paniai berdarah 2014 yang menewaskan 4 anak pelajar SMA merupakan fakta yang tak terbantakan., Lihat dalam Markus Haluk, *Papua Di Ambang Kepunahan*, Jayapura: Sekretariat Tim Kerja ULMWP, 2015, hal. 3-12; Bdk. Otmar Oehring, 2009, hal. 5-7.

40 Eddy, 2017, hal. 350-356.

Meskipun nada ketidakpuasan<sup>41</sup> terhadap Gereja Katolik semakin menguat tiga tahun belakangan ini dengan berbagai motif tuntutan, namun Gereja sesungguhnya tidak sepenuhnya menutup mata. Gereja secara terbatas telah melakukan apa yang bisa dilakukan terutama terkait suara kenabiannya. Pengungkapan kasus kekerasan militer disekitar perusahaan PT Freeport Indonesia pada tahun 1994 oleh Mgr. Herman Munninghoff, OFM merupakan satu bukti suara Gereja terhadap kekerasan yang dilakukan kepada orang Papua meskipun itu tidak menjadi representasi suara Gereja terhadap kasus kasus pelanggaran HAM yang semakin subur di era Otsus. Selain itu Uskup Leo Laba Ladjar, OFM sebagai penggantinya memilih menyuarahkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM dengan jalan yang lebih dialogis baik pertemuan langsung dengan pihak-pihak yang terkait maupun melalui surat suara gembala.<sup>42</sup> Gereja partikular bahkan di masa Otsus (otonomi khusus), Gereja Katolik Papua memang belum pernah mengeluarkan semacam surat gembala bersama (5 Keuskupan) di Papua terkait situasi pelanggaran HAM yang terjadi. Karena menurut Uskup Leo jika terjadi kasus pelanggaran HAM yang bersuara uskup berdasarkan wilayah kegembalannya. Uskup yang lain sifatnya hanya mendukung saja.<sup>43</sup>

### **Gereja Katolik Daerah Otonomi Khusus (Otsus)**

Wajah Gereja Katolik bahkan Kristen umumnya di daerah Otsus, 2001 terjadi perubahan yang amat besar. Sebelum undang undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 untuk Provinsi Papua diberlakukan pada tahun 2002 laju pertumbuhan penduduk non Papua tidak begitu signifikan sehingga masih didominasi oleh orang asli Papua. Namun semenjak UU Otsus diberlakukan penyebaran penduduk dari berbagai daerah jauh lebih cepat dan menghiasi wajah Papua yang multi kultural. Tingginya migrasi di Papua pernah diakui oleh mantan gubernur Papua, Barnabas Suebu dihadapan rakyat pada tahun 2010 bahwa jumlah migrasi di Papua cukup tinggi bahkan lebih tinggi di dunia karena

---

41 Nada nada ketidakpuasan umat asli Papua terhadap sikap para pimpinan Gereja Katolik (uskup) Papua terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua terlihat dari ungkapan isi hati dari sejumlah aktivis Papua yang memberikan surat dalam noken dan diserahkan kepada 20 uskup dari Pasifik (Oseania) yang berkunjung di Jayapura pada 7-8 April 2016. Selain itu ada sejumlah orang muda Papua yang menamakan diri umat Katolik Papua menuntut para uskup Papua yang melakukan pertemuan di Maranata-Waena pada 9 Juni 2017 untuk bersuara bersama atas kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

42 Beberapa suara kenabian yang paling jelas dan tegas dari uskup Leo Laba Ladjar, OFM dapat dilihat dalam buku "Membangun Papua Tanah Damai: Kumpulan Ceramah Uskup Leo Laba Ladjar", yang diterbitkan oleh Sekeretariat Keuskupan Jayapura, 2009.

43 Wawancara dengan uskup Leo Laba Ladjar, OFM di wisma keuskupan dok II Jayapura pada, 20 Juli 2017 pukul 08,30-11.30 WIT.

mencapai 15% per tahunnya padahal normalnya hanya 1 %. Kepala dinas perhubungan provinsi Papua menyebutkan pada Maret 2014 jumlah migran yang masuk ke Papua sebanyak 13.000 orang. Jumlah itu kemudian meningkat pada tahun 2015 sebanyak 15.000 orang. Data ini belum termasuk untuk dua tahun terakhir ini (2016-2017). Sementara itu sebuah penelitian yang dilakukan dalam Forum *Indonesia Solidarity* dan *The West Papua Paper Project*, 9-10 Agustus 2017 di Sidney Australia, Dr. Jim Elmslie menyebutkan populasi penduduk non Papua pada tahun 2020 akan meningkat tajam menjadi 70,8% dari total 6,7 juta penduduk Papua. Yang lebih mengkhawatirkan dari itu pada 2030, Elmslie memprediksi penduduk asli Papua hanya 15,2% dari 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan bahasa lain perbandingan penduduk antara asli Papua dan non Papua pada 2030 akan mencapai 1:6,5.<sup>44</sup>

Degradasi yang tajam itu sesungguhnya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang Papua. Situasi pendidikan dan kesehatan yang buruk, tingkat kemiskinan yang tinggi (urutan pertama secara nasional), pembangunan infrastruktur yang jauh tertinggal menjadi pergumulan tersendiri bagi orang Papua.<sup>45</sup> Kalau kita melihat secara kritis akar dari kehidupan yang tidak normal itu merupakan anak kandung dari perbedaan pandangan politik antara Papua merdeka (M) harga mati versus NKRI harga mati. Hasil perkebangbiakan perbedaan sikap tanpa kompromi itu oleh tim peneliti Papua, LIPI (2004) dikategorikan dalam empat isu strategis sebagai sumber konflik: Sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; gagalnya pembangunan di Papua; dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otsus serta marginalisasi orang Papua.<sup>46</sup> Itulah sebabnya, Prof. Nico Syukur Dister guru besar STFT Fajar Timur dalam artikelnya “Peranan Gereja Katolik Terhadap Situasi Papua” menegaskan apapun niat baiknya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat untuk orang Papua tidak akan memberhentikan niatnya untuk menentukan nasib sendiri.<sup>47</sup> Gereja Katolik di Papua sedang berziarah dalam situasi pergumulan umat Tuhan demikian.

Lalu sejauh mana Gereja Katolik berperan ditengah pergumulan dan pertanyaan masyarakat Papua demikian? Gereja tidak mungkin dan tidak

---

44 Lih. Haluk, 2015, hal. 13-18.

45 Lih. Peter Tukan, *Membangun Papua Tanah Damai: Kumpulan Ceramah Uskup Leo Laba Ladjar*, Jayapura: Sekretariat Keuskupan Jayapura, 2009, hal. 101.

46 Perbedaan pandangan politik antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia yang sudah menganggap persoalan Papua sudah final dimana perbedaan pandangan itu melahirkan 4 anak masalah di Papua dilihat dalam Muridan S. Widjojo, *Papua Road Map*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hal. 6-7.

47 Tulisan ini dipublikasikan oleh SKPKC Fransiskan Papua, pada 2 Juni 2017.

dapat merangkul hanya satu kelompok umat dan mengeksklusifkan kelompok yang lain. Gereja sebagai bunda merangkul semua orang apapun kepentingan dan perbedaan politiknya karena Gereja merupakan sakramen keselamatan bagi semua orang (LG,5,7). Meskipun demikian, itu tidak berarti membuat Gereja Katolik merelatifkan keberpihakannya. Gereja mesti bersikap kepada siapa harus berpihak sesuai dengan kebenaran sabda Ilahi yakni Yesus Kristus sendiri. Oleh karenanya, Gereja Keuskupan Jayapura misalnya dalam merumuskan arah dasar Gerejanya, terjadi perubahan seturut dengan situasi dan perkembangan umat yang semakin heterogen itu. Hal ini bisa dilihat dari hasil sinode 2006 dimana peserta sinode bergumul selain pengakaran Gereja pada jati diri dan budaya Papua, tetapi juga tetap terbuka dengan perkembangan baru yang terjadi dalam hidup bermasyarakat meskipun perwujudan amanat sinode tidak semuda yang diharapkan.<sup>48</sup> Maka paham eklesiologi yang tersirat dari pergumulan itu adalah Gereja sebagai persekutuan. Gereja tidak hanya identik dengan uskup, imam, biarawan biarawati atau bahkan para misionaris. Tetapi Gereja adalah kumpulan semua orang beriman. Gereja juga tidak eksklusif hanya bagi golongan atau kelompok tertentu tetapi untuk semua orang apapun latar belakangnya.<sup>49</sup>

Secara praksis Gereja tentu melakukan banyak hal sesuai arah dasar misinya, meskipun masih banyak kritikan yang mesti menjadi catatan dalam membenahi diri demi efektifitas misi yang dijalankannya. Buku "Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua: Narasi Historis 50 Tahun Terakhir Keuskupan Jayapura", hasil telusuran Eddy Kristiyanto doktor sejarah Gereja selama 6 tahun (2011-2016) secara implisit mengungkapkan pergumulan dan perjuangan Gereja Katolik ditengah peliknya persoalan Papua. Buku ini memang tidak representatif untuk 5 keuskupan di Papua dimana masing masing keuskupan memiliki konteks persoalan lokalnya. Namun satu hal yang membuat wajah Gereja di Papua muncul mirip adalah pergumulan orang Papua terhadap nasib dan masa depan hidupnya. Ancaman eksistensi orang Papua terjadi disegala lini kehidupan yang dalam UU Otsus dikategorikan 5 aspek pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur) serta kasus kasus pelanggaran HAM sampai kini menambah bekas traumatis dalam hati dan jiwa orang Papua. Pelaku terhadap ancaman eksistensi orang Papua pun tidak hanya oleh militer tetapi juga oleh pemerintah daerah yang bermental korup.<sup>50</sup>

---

48 Bdk. *Membangun Gereja Mandiri Yang Misioner, Keuskupan Jayapura*, 2006, hal. 22,48.

49 Eddy, 2017, hal. 128-129.

50 Tukan, 2009, hal. 34-35.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa akar persoalan pandangan politik yang berbeda melahirkan banyak hal yang tidak normal bagi manusia Papua. Gereja tidak punya kapasitas bergerak jauh kearah politik. Karena itu bukan ranahnya. Tugas Gereja adalah mengarahkan umatnya supaya memiliki sikap politik sesuai dengan ajaran Kristus yang diwartakan dan sekaligus terlibat dalam urusan-urusan politik demi kepentingan masyarakat.<sup>51</sup> Oleh karenanya sejak awal Papua bermasalah, terjadi perebutan antara pemerintah Belanda, Jepang kemudian Indonesia, para misionaris dan pimpinan Gereja Katolik tidak menaruh perhatian besar terhadap sikap politik yang berbeda. Yang menjadi konsen Gereja adalah hak-hak perlindungan masyarakat akibat dari perbedaan pandangan itu disatu pihak dan hak-hak hidup dipihak yang lain. Untuk itu berikut ini dapat kami paparkan apa yang Gereja perjuangkan berkaitan dengan pergumulan dan perjuangan masyarakat Papua dalam beberapa aspek kehidupan.

### **Pelayanan Gereja di BidangKesehatan**

Sasaran misi, pertama-tama, adalah keselamatan jiwa-jiwa. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran (AG, 7). Maka dapat dimengerti kalau para misionaris masuk ke wilayah misi tertentu termasuk di Papua tidak hanya membawa warta Injil tetapi juga perlengkapan medis (obat-obatan). Mereka selainewartakan Injil dengan bahasa yang bisa dimengerti atau dengan bahasa “gerak tubuh” tetapi juga dapat mengobati masyarakat yang kesehatannya terganggu. Pelayanan demikian sesungguhnya wujud kongkrit dari rumusan misi pada awal abad 20 dan kemudian abad 21 ini bahwa sasaran misi bukan lagi membaptis orang sebanyak mungkin tetapi memberi kesaksian hidup akan Trinitas.<sup>52</sup> Maka melayani di bidang kesehatan adalah perwujudan atau inkarnasi dari Injil itu sendiri. Artinya Sabda gembira yang diwartakan tidak hanya bersifat pengajaran (katekese) melainkan juga aksi nyata sebagai ungkapan belas kasihAllah bagi keselamatan manusia.

---

51 Dalam ajaran sosial Gereja secara tegas dikatakan, Gereja tidak terlibat dalam politik praktis. Tugas Gereja adalah melayani kebutuhan rohani manusia namun tetap berdiri kokoh dengan ajaran moralnya untuk membela kemanusiaannya. Maka Sebagai persekutuan keagamaan yang hierarkis, Gereja memang tidak mempunyai tugas menyumbangkan pemecahan konkret dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik untuk keadilan di dunia. Tetapi Gereja tetap bertugas membela dan memajukan martabat dan hak-hak asasi pribadi manusia” (Sinode Para Uskup, 1971; Lih. KHK kan, 747 § 2).

52 Pandangan Trinitarian sebagai dasar teologi misi dapat dinyatakan dalam *Ad Gentes* dekret tentang aktivitas misioner Gereja terutama pada artikel 2,3,4.

Pelayanan Gereja di bidang kesehatan seturut dengan perkembangan dan tantangan zaman mengalami perubahan pendekatan. Pelayanan pada masa misi dan partikular lebih banyak bergerak di wilayah pedalaman yang basis pasiennya adalah orang asli Papua. Banyak orang diselamatkan oleh berbagai macam ancaman penyakit yang tersebar luas pada masa itu. Seperti misalnya; penyakit gondok, karies berkaitan dengan gigi, penyakit disentris gejalannya pada sakit perut yang sebagian besar disebabkan oleh cacing. Acapkali ditemukan juga orang sakit jiwa meskipun penderita sama sekali tidak berbahaya.<sup>53</sup> Itu merupakan beberapa contoh penyakit yang dapat ditolong dari pelayanan Gereja di era misi. Tentu masih banyak lagi yang tidak dapat diuraikan secara lengkap di sini.

Pelayanan lebih sistematis terjadi pada tahun 1990-an<sup>54</sup> ketika kuria Keuskupan Jayapura bersama beberapa dokter Katolik di mana Mgr. Herman Munninghoff, OFM mendirikan rumah sakit Dian Harapan (RDH).<sup>55</sup> Namun pertanyaannya sejauh mana pelayanan RDH menjawab satu persoalan yang dihadapi orang Papua dalam situasi memburuknya kesehatan saat ini? Bagaimana RDH melayani sesuai visi yang diembangkannya, "Menghadirkan cinta kasih dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berkekurangan dan sehingga mereka sebagai pewaris Kerajaan Allah menegakan dan mengamalkan cinta kasih dan meneruskan karyanya."<sup>56</sup> Sejahtera mana Gereja melalui pelayanan di bidang kesehatan dapat memberi harapan hidup bagi orang Papua yang kini (era Otsus) semakin terancam karena berbagai jenis penyakit yang dapat menyerang. Serangan penyakit apapun memang menjadi gejala umum siapapun manusia tanpa membatasi ras, golongan maupun agama. Tetapi satu yang menjadi kekuatiran orang Papua adalah keterjaminan pelayanan medis karena dengan derasnya tekanan arus politik antara Papua M harga mati dan NKRI harga mati membuat mereka was-was berobat di rumah sakit negeri atau bahkan rumah sakit swasta milik militer seperti Bayangkara, meskipun secara ideal rumah sakit dan medis bekerja untuk menyelamatkan jiwa manusia. Kekuatiran ini semakin menggema ditingkat masyarakat karena ditemukan banyak fakta

---

53 Eddy, 2017, hal. 332-336.

54 Semula pater Cremes, OFM, yang cukup vokal dalam misi dibanding rekan-rekannya, menginginkan sebuah rumah sakit Katolik tersendiri, namun pemerintah Hindia-Belanda tidak menghendakinya. Maka bersama *Zending* hanya mendirikan poliklinik atau semacamnya dan itu dapat didukung oleh pemerintah; Sloot, 2012, hal. 151-152.

55 Dapat dipastikan 5 Keuskupan di Papua (K. Agung Merauke, K. Agats, K. Jayapura, K. Timika dan K. Sorong) melakukan pelayanan di bidang kesehatan dengan yayasan rumah sakit masing masing Keuskupan. Namun dalam karya ini, kami hanya mengambil sample untuk Keuskupan Jayapura.

56 Eddy, 2017, hal. 339.

kematian orang Papua baik yang masal maupun *person* yang sampai saat ini tidak terungkap penyebab kematian atau penyakitnya.<sup>57</sup> Maka menyadari dan berpegang teguh pada visi sesungguhnya mesti menjadi roh yang tetap dihidupkan mengingat rumah sakit swasta yang melayani dibawah yaysan Gereja Katolik (seperti: RDH) didirikan pertama tama untuk menjawab kebutuhan masyarakat pedalaman dan orang orang kecil yang tidak selalu menikmati pelayanan kesehatan dengan baik terutama terkait kekuatan tadi. Di situlah Gereja sungguh sungguh hadir untuk memberi harapan hidup dan keselamatan bagi yang lemah dan yang sedang terancam akan jaminan hidupnya.

### Pelayanan Gereja dalambidang Pendidikan

Selain bidang kesehatan, Gereja juga melayani di bidang pendidikan. Gereja menyadari bahwa pendidikan tidak hanya menjadi sarana evangelisasi yang potensial tetapi juga perlunya melayani manusia berdasarkan hak dasar atas pendidikannya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan Kristen oleh Gereja sebenarnya sudah digumuli jauh sebelum konsili vatican II.<sup>58</sup> Namun embrio itu secara serius digumuli oleh bapa-bapa Konsili suci dan berhasil merumuskan satu dekrit tentang pendidikan Kristen *Gravissimum Educationis dalam K.V.II*: “Pendidikan itu tidak hanya bertujuan pendewasaan pribadi manusia seperti yang telah diuraikan, melainkan terutama hendak mencapai ....supaya mereka belajar bersujud kepada Allah Bapa dalam Roh dan kebenaran” (GE,2; bdk Yoh 4:23).

Mengingat pentingnya pendidikan maka ketika para misionaris (SJ, MSC, OFM, OSA) masuk dan bermisi di Papua juga mengembangkan pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan non formal seperti ketrampilan menjahit, pertukangan, pertanian, pengobatan dll. Sementara itu pendidikan formal para misionaris mendirikan sekolah kampung atau desa di sejumlah tempat. Mereka mempunyai program tiga tahun dalam hal membaca, berhitung, menulis, menggambar dan pengetahuan alam. Siswa yang dilihat mampu mendapat kesempatan sekolah lanjutan setingkat sekolah dasar Eropa.<sup>59</sup> Setelah negosiasi dengan

---

57 Fakta fakta kematian misterius orang Papua dan memburuknya kesehatan yang menjadi satu pintu menuju *genodise* selain kekerasan militer dapat dilihat dalam laporan SKPKC Fransiskan Papua, *Papua di Ambang Kehancuran*, 2017, hal. 3-7; Bdk. Muridan, 2009, hal. 109-110.

58 Sejumlah ensiklik terkait pendidikan sebelum K.V.II misalnya; Benediktus XV, Surat Apostolik *Communes Literas*, tgl. 10 April 1919:AAS 11 (1919), hal. 172; Pius XI, Ensiklik *Divini Illius Magistri*, tgl. 31 Desember 1929: AAS 22 (1930), hal. 49-86; Pius XII, Amanat Radio, tgl. 24 Desember 1942: AAS 35 (1943), hal.12,19; Yohanes XXIII, Amanat pada Ulang Tahun ke-30 Ensiklik *Divini Illius Magistri* tgl. 30 Desember 1959: AAS 52 (1960), hal. 57-58.

59 Sloot, 2012, hal. 154.

pemerintah, misi dan *zending* kemudian mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk sekolah lanjutan seperti *Vervolgschool* (VVS), *Opleiding voor Dorps Onderwijzer* (ODO) pendidikan bagi guru-guru sekolah desa, *school A*, *school B* bagi orang Papua. Para misionaris berpikir dan berjuang keras berdasarkan pertimbangan bahwa orang Papua tidak boleh puas hanya dengan membaca, berhitung dan menulis tetapi dengan memperkenalkan budaya barat maka budaya Papua pun akan berubah. Artinya masyarakat Papua yang masih berpengetahuan alam itu dapat berubah pandangan kepada cara pandang modern ala barat selain tentunya melatih skil untuk pelayanan maupun katekese.<sup>60</sup>

Semangat pengabdian dan pengkaderan bagi orang Papua oleh para misionaris di era Otsus terlihat turun dratis. Sebabnya memang beragam. Tetapi satu hal yang cukup berpengaruh besar adalah kebijakan pemerintah pusat menghentikan bantuan biaya pendidikan dari negara asing melalui jalur misi terutama dari Belanda. Kebijakan pemerintah ini seakan memutuskan urat nadi Gereja dalam melayani masyarakat Papua melalui pendidikan. Pihak Yayasan Katolik tidak dapat leluasa mengoperasikan sekolah Katolik secara mandiri dan otonom karena berbagai kendala terutama dari aspek biaya yang berdampak kuat pada tenaga guru. Sekolah dasar yang dikelola dibawah yayasan YPPK semakin sulit di wilayah pedalaman. Hak hak anak anak Papua akan pendidikan semakin terabaikan. Ini merupakan satu gejala penghancuran generasi muda Papua. Di era Otsus dimana meluasnya peluang kerja dengan upah yang menjanjikan terutama di bidang pemerintahan atau ASN secara tidak langsung berdampak pada melemahnya semangat pengabdian dengan upah yang minium. Banyak guru yayasan Katolik telah beralih profesi atau bahkan guru PNS yang mengajar di sekolah Katolik semakin sulit diatur atau dikontrol sesuai aturan yayasan.<sup>61</sup>

Gereja Katolik Papua memang sedang menghadapi satu tantangan besar terutama pelayananan di bidang pendidikan. Keuskupan Agats diberitakan sudah mulai ambil langkah dimana sebagian sekolahnya diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Meski sulit menerima kenyataan itu, namun keputusan secara bijaksana mesti diambil demi menyelamatkan yang tersisa daripada menimbulkan resiko yang lebih

---

60 *Ibid.*, hal. 156.

61 Terkait melemahnya kebijakan yayasan YPPK keuskupan Jayapura dalam menempatkan guru akibat tindakan pemerintah pusat memutuskan bantuan biaya dari negara asing terutama Belanda dikisahkan oleh sekretaris eksekutif YPPK, Matias Wiran saat seminar dalam rangkai paska nuansa Papua dengan tema "Meneropong wajah pendidikan Katolik Papua dahulu, sekarang dan yang akan datang" di aula st. Yosep STFT "Fajar Timur" Abepura pada 12 April 2014.

besar.<sup>62</sup> Keuskupan Jayapura dalam rangkai 40 tahun YPPK, 2014 pastor Dr. Paul Richard Renwarin, Prmelakukan penelitian yang memberi kesimpulan bahwa sebagian besar SD YPPK di kampung atau pedalaman hampir akan ditutup karena banyak guru tidak ada ditempat (mengajar).<sup>63</sup> Seperti yang diuraikan diatas bahwa para guru YPPK yang sudah PNS memang sulit diatur karena sudah tidak dibawah pengawasan Yayasan lagi. Maka tampaknya Keuskupan Jayapura mesti ambil langkah untuk segera membenahi gejala demikian.

Tanpa menggerogoti sifat Gereja yang universal, keberadaan YPPK mestinya menjadi satu harapan bagi pergumulan hidup masyarakat Papua. Orang Papua sedang bergumul dengan kualitas pendidikan yang semakin merosot karena anak-anak di pedalaman tidak mendapatkan pendidikan secara normal. Gejala umum anak lulusan SD, SMP bahkan SMA di pedalaman Papua tidak lancar membaca, berhitung, menulis bukan sesuatu yang asing lagi.<sup>64</sup> Terlalu sering ditemukan ketika hendak tes masuk SMP, SMA bahkan perguruan tinggi di kota-kota. Kita bisa memastikan kemampuan mereka dalam menganalisa sesuatu kalau membaca saja tidak lancar. Ini merupakan sistem pembodohan dan penghancuran nasib anak-anak Papua karena bagaimana pun sejarah membuktikan pendidikan merupakan gerbang terdepan peradaban manusia. Revolusi Perancis yang melahirkan pencerahan dimana kekuasaan bangsawan dan otoritas Gereja pada masa abad pertengahan mengekang kebebasan masyarakat kecil sekian ribu tahun dapat dihancurkan dampak dari sikap kritis manusia. Kekritisn manusia terbentuk oleh karena pendidikan. Pendidikan dapat memberikan peluang bagi masyarakat Papua secara kritis melihat diri dan problemnya untuk menata diri lebih baik.<sup>65</sup> Gereja Katolik di Papua mesti lebih progresif dalam mendorong pendidikan karena pendidikanlah pintu masuk dalam memperbaiki aspek kemanusiaan yang kini semakin mengkwatirkan selain sarana evangelisasi. Pergumulan dan perjuangan pastor Jonh Kore, OFM dan Pater Nico Dister, OFM yang adalah juga guru besar STFT "Fajar Timur" dalam mendorong pendidikan beratap satu (berpola asrama), SD, SMP, SMA St. Antonius Padwa di Sentani dan menurut

---

62 Kesaksian dari suster Martina, OSU yang melayani pendidikan di Keuskupan Agats selama 10 tahun. Wawancara pada 5 September 2017 di ruang kuliah pada program magister teologi, fakultas filsafat Unpar-Bandung, pukul 12.00 WIB.

63 Hasil penelitian pastor Dr. Paul Richard Renwarin, Pr dipresentasikan saat lokakarya 40 tahun YPPK Keuskupan Jayapura di hotel Grand Abe dengan tema "Tentang realitas YPPK antara: hambatan, tantangan dan peluang serta usulan" pada 21 Agustus 2014.

64 Usaha pendidikan di Keuskupan Jayapura dan kenyataan kemerosotan kualitas serta tantangan tantangan yang dihadapi dapat ditegaskan oleh Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM dalam Surat Gambala Paskah 16 Maret 2003 (Eddy, 2017, hal. 321-322).

65 *Ibid.*, hal. 2017:283.

rencananya sedang diupayakan untuk perguruan tinggi (PT) dalam beberapa waktu ke depan menjadi model yang patut dicontoh. Afirmasi dari pastor Jonh dan pater Nico itu sesungguhnya memberikan suatu harapan bagi masyarakat Papua dalam menyelamatkan generasi dari sistem pembodohan yang sedang terjadi pada diri orang Papua. Juga membuka mata pihak Gereja untuk lebih serius di bidang pendidikan.<sup>66</sup> Menurut pastor Jonh, anak-anak yang sekolah di Antonius hampir 98% anak Papua. Baginya Generasi Papua dapat diselamatkan kalau Gereja betul-betul memperhatikan bidang pendidikan: "Gereja memang mempunyai YPPK namun YPPK sekarang sudah kehilangan taring. Gereja harus memikirkan cara bagaimana memajukan anak-anak Papua melalui pendidikan.

### **PelayananGereja di Bidang Ekonomi**

Meskipun bukan tugas utamanya<sup>67</sup>, Gereja dengan kesadaran panggilannya di dalam dunia bersama masyarakat mengambil peran dalam bidang ekonomi. Gereja memang tidak memberikan atau bertanggungjawab secara praktis namun mendorong sekaligus memberikan semangat kepada umat bagaimana mengembangkan ekonominya secara baik. Keberadaan Komisi Sosekmas (sosial ekonomi masyarakat) di tingkat Keuskupan maupun KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia) merupakan wujud nyata keprihatian dan pelayanan Gereja di bidang ekonomimasyarakat.

Sejauh mana komisi Sosekmas secara kusus Keuskupan-Keuskupan di Papua (Merauke, Agats, Jayapura, Timika dan Manokwari-Sorong) melayani masyarakat Papua di bidang ekonomi? Menurut bapak Bertje Ngantung sekretaris komisi Sesekmas Keuskupan Jayapura bahwa sejauh ini komisi Sosekmas lebih banyak mengadakan pertemuan-pertemuan komisi di tingkat regional maupun KWI dan pelatihan-pelatihan sekaligus animasi dari pihak komisi Sosekmas KWI.<sup>68</sup> Kegiatannya belum mengarah pada pemberdayaan ataupun pendampingan secara kontinyu ditingkat umat terutama masyarakat kecil yang patut diberdayakan. Di tingkat paroki memang hampir sebagian besar memiliki CU (Credit Unio) atau bahkan menurut kesaksian bapak Bertje di kombasnya ada usaha semacam CU, namun belum bisa membantu umat secara signifikan dalam

---

66 Bdk. Eddy, 2017, hal. 275.

67 Tugas utama Gereja adalahewartakan Injil dan menjaga moral supaya hidup manusia terarah kepada kehidupan dan kekudusan Sang pencipta yaitu Allah.

68 Wawancara dengan bapak Bertje Ngantung (sekretaris Komisi Sosekmas Keuskupan Jayapura) di ruang Sekretariat Pastoral Keuskupan Jayapura pada 15 Februari 2015, pukul 10.00-11.00 WIT.

hal ekonomi. Bapak Bertje yakin bahwa meskipun skalanya kecil, namun memberikan satu semangat usaha dan minimal memberikan pencerahan bagi umat dalam melihat peluang yang ada.

Usaha-usaha kecil yang dilakukan maupun pelatihan sebenarnya memberikan gambaran akan peluang dalam memberdayakan umat. Namun sejauh ini Gereja nampaknya dengan berbagai kesulitan terutama dari aspek tenaga yang kompeten di bidang ekonomi belum berbuat banyak. Dalam konteks perhatian Gereja kepada ekonomi masyarakat lokal Papua mesti ada suatu gerakan afirmasi. Kalau Gereja terus bergumul dengan kesulitan dengan fokus pada gereja universal artinya hanya berpikir secara umum, maka Gereja sulit mewujudkan keterlibatannya secara kongkrit dalam pergumulan hidup orang Papua terutama dalam bidang ekonomi. Orang Papua yang kritis kini mulai mempertanyakan keberpihakan Gereja terhadap situasi tidak normal yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Bagaimana mungkin orang Papua hidup di bawah standar kelayakan di atas limpahnya kekayaan alam dan tanah yang subur? Pergumulan atau pertanyaan semacam ini memang layak dialamatkan kepada pemerintah daerah yang memang bertugas untuk mengurus kesejahteraan masyarakat. Namun harapan kepada pemerintah daerah Otsus sudah amat menipis. Meskipun dana dari pusat dikucurkan miliaran rupiah, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan dana itu tidak berarti apa-apa bagi pengembangan hidup masyarakat Papua. Menanggapi situasi yang amat tidak normal dan memalukan ini, Uskup Leo dengan cukup tegas mengkritisi bahwa salah satu sebab orang Papua semakin tertinggal ini akibat dari pemerintah daerah yang tidak serius mengurus orang Papua dengan kewenangan yang diberikan.<sup>69</sup> Pembagian dana Otsus tanpa suatu mekanisme pendampingan demi tepat sasaran membentuk mental masyarakat Papua yang konsumtif. Di samping itu dengan munculnya sistem pasar modal dan pengusaha pedagang non Papua membuat masyarakat Papua semakin terjepit secara ekonomi. Hasil perkebunan mereka sulit bersaing dengan masyarakat bukan asli yang lebih terampil dalam hal pemasaran. Akibatnya hasil kerja mereka semakin tersingkirkan sehingga secara ekonomi juga semakin terdegradasi. Selain itu orang Papua sedang mengalami kemiskinan sistematis karena selain kekayaan alam Papua yang melimpah (PT. Freeport misalnya) dibawah lari oleh Amerika dan Jakarta sementara orang Papua hidup dibawah standar kelayakan di atas limpahnya kekayaan itu. Tetapi juga masyarakat Papua semacam dimanjakan oleh pemerintah melalui dana Otsus sehingga menjadi mental konsumen. Orang Papua terutama di daerah pegunungan yang memiliki tradisi berkebun banyak yang malas bekerja karena menggantungkan

---

69 Lih. Tukan, 2009, hal. 98-99.

hidup dari bantuan pemerintah. Ini merupakan gejala pembunuhan mental secara sistematis.<sup>70</sup> Di sinilah Gereja mesti berdiri tegak untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat Papua baik dalam hal keterampilan tetapi juga melancarkan suara kenabian memprotes monopoli pasar ekonomi yang terjadi dan eksploitasi sumber daya alam Papua tanpa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.<sup>71</sup> Supaya masyarakat Papua dapat hidup layak secara ekonomi sebagai wujud dari warta gembira yang diberitakan oleh Gereja.

## Perhatian Gereja di Bidang HAM

Satu tantangan besar yang dihadapi Gereja Katolik bersama gereja Kristen dan agama lain di Papua adalah persoalan pelanggaran HAM. Semenjak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, 1969 terjadi banyak pelanggaran HAM dan korbannya adalah masyarakat asli Papua dari pihak militer Indonesia. Di antara tahun 1962-1998 sebelum resim orde baru tumbang, Papua dijadikan daerah yang disebut operasi militer (DOM). Menurut data kasus pelanggaran HAM berat, pihak kesatuan keamanan 12 kali melakukan operasi militer (DOM) berskala besar. Masing-masing operasi memiliki sebutannya sendiri-sendiri.<sup>72</sup> Kalau dirunut berdasarkan masa, maka dapat dikategorikan tiga periode. Periode pertama adalah periode transisi (1963-1969) dimana pemerintah Indonesia memasukan ribuan aparat keamanan dan petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua memilih untuk berintegrasi dengan NKRI. Pada masa ini terjadi penangkapan, intimidasi dan penahanan diluar hukum serta pembunuhan.<sup>73</sup> Periode kedua adalah masa perlawanan rakyat Papua memprotes hasil *Act of Free Choice* (1970-1984). Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap simbol perlawanan rakyat Papua terhadap pemerintah sehingga operasi militer patut diadakan demi membasmi basis OPM. Ribuan militer diterjunkan dan kebebasan rakyat dibatasi serta pembantaian terhadap rakyat dilakukan. Contoh operasi diantaranya: Kasus Jayapura (1970, 1980), kasus Biak (1970, 1980), kasus Wamena (1977) dan pembunuhan dua seniman Papua yang mengangkat lagu-lagu Papua, Arnold C. Ap dan Eduard Mofu (1984) dan hampir 12.000 penduduk mengungsi ke Papua New Guinea.

---

70 A. Eddy Kristiyanto (editor), *Spiritualitas Sosial Suatu Kajian Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal. 211-216.

71 Dengan sikap empati, uskup Leo Laba Ladjar, OFM sempat melayangkan surat terbuka kepada Wali Kota Jayapura untuk diberi tempat bagi mama-mama pedagang kecil yang kehilangan tempat berjualan karena di pasar Ampera hendak ditutup demi penertiban dan penataan kota Jayapura, *Cepos*, Rabu 15 September 2004.

72 Oehring, 2009, hal. 5; Bdk. Haluk, 2015, hal. 4-6.

73 Drooglever, 2007, hal. 511.

Periode ketiga adalah lanjutan dari tahap penumpasan OPM secara kusus di wilayah pegunungan terutama penumpasan OPM pimpinan Kelly Kwalik yang dituduh menyandera para ilmuwan Barat di wilayah Mapeduma, pegunungan tengah (1985-1995). Drama penyanderaan itu menjadi alasan pihak keamanan melakukan operasinya dengan dalil pembebasan sandera dimana sekitar 35 penduduk sipil dibunuh, 13 perempuan diperkosa, 166 rumah penduduk serta 13 gereja dibakar.<sup>74</sup> Kasus periode terakhir inilah yang menjadi titik balik pihak pimpinan Gereja Katolik Papua dalam menyuarakan HAM. Pada tahun 1994/1995 uskup Jayapura, Mgr. Herman Monninghoff, OFM melancarkan protes terhadap tindakan militer yang amat tidak manusiawi itu karena beliau tidak percaya kasus penyanderaan itu murni oleh OPM. Tanggapan pimpinan Gereja atas kasus operasi militer yang mengorbankan ribuan nyawa manusia Papua dalam rentang waktu itu sedikit mengherankan karena suara itu muncul pada kasus periode ketiga. Sementara menjadi pertanyaan adalah padamasa operasi kedua yang diperkirakan korban jauh lebih banyak suara pimpinan Gereja tidak muncul.<sup>75</sup> Laporan Sejarah terutama dari Romo Eddy “Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua: Narasi Historis 50 Tahun Terakhir Keuskupan Jayapura” terkait HAM tidak sama sekali menarasikan situasi dan posisi pimpinan Gereja Papua pada masa itu. Romo Eddy baru mulai dari periode ketiga (1995), ketika uskup Herman bersuara terkait kasus pembunuhan di Timika. Maka Munninghoff dikatakan pimpinan Gereja Katolik yang pertama mendorong Gereja di Papua melawan kekerasan dengan suara kenabian.<sup>76</sup> Selain itu ada almarhum Pastor Nato Gobay (imam diosesan Keuskupan Timika) dan kemudian muncul Pastor Jonh Jonga (imam diosesan keuskupan Jayapura) yang juga cukup vokal dalam membela harkat dan martabat manusia yang dibunuh secara tidak manusiawi. Mereka membela karena berdasarkan ajaran Gereja tentang pribadi manusia yang harus dilindungi dan dihormatisebagai citra Allah<sup>77</sup> bukan karena motif politik.

---

74 Data ini bersumber dari “12 Tahun Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua” Catatan Refleksi 12 Tahun Kehadiran ELSHAM di Tanah Papua [www.elshamnewsservice.org](http://www.elshamnewsservice.org). Lihat juga Oehring, 2009, hal. 6.

75 Dugaan kuat bahwa Gereja di Papua pada masa periode kedua berada dalam tekanan yang berat oleh militer Indonesia karena komunikasi dan informasi yang sulit, namun juga karena pada masa-masa itu merupakan klimaksnya rezim Orde Baru di mana hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi pembukaan demokrasi dan diberlakukan pemerintahan otoriter dibawah rezim Soeharto.

76 Lih. Eddy, 2017, hal. 249.

77 Dasar refleksi teologis tentang *Hak Asasi Manusia dan Gereja* seperti yang diuraikan oleh Romo Eddy bahwa telah diterbitkan oleh Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian yang memuat dua gagasan fundamental yakni relasi Gereja dan HAM berikut prospek masa depannya; dan basis teologi HAM, lihat Eddy, 2017, hal. 353.

## Mendirikan SKP

Berdasarkan pengalaman itu kemudian pimpinan Gereja Keuskupan Jayapura mengambil kebijakan untuk mendirikan sekretariat yang menangani secara khusus bagian HAM yang disebut SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) pada tahun 1997. Di sekretariat ini, diurus data-data korban pelanggaran HAM yang kemudian menjadi acuan dalam tindakan maupun suara Provetis Gereja atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Menurut Theo van den Broek (mantan kepala SKP Jayapura) ada dua tujuan mendirikan SKP; pertama, mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kedua, untuk menyuarakan persoalan masyarakat karena itu juga merupakan persoalan Gereja.<sup>78</sup> Mengingat kasus pelanggaran HAM tidak hanya wilayah pelayanan Keuskupan Jayapura, melainkan diseluruh pelosot Papua, maka SKP Jayapura mencoba mengajak bekerjasama dengan keuskupan lain seperti Keuskupan Merauke, Keuskupan Agats dan Keuskupan Sorong untuk mendirikan SKP yang sama.<sup>79</sup> Pendirian SKP kemudian diikuti juga oleh Keuskupan Timika setelah dimekarkan dari Keuskupan Jayapura pada 2004. Dengan demikian hampir semua keuskupan di Papua (5 Keuskupan) memiliki SKP walaupun Keuskupan Jayapura kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Ordo Fransiskan dikemudian hari.<sup>80</sup> Itulah wujud perhatian yang serius dari Gereja terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang hampir sebagian besar korbannya adalah masyarakat Papua.

### *Kerja Sama Para Pimpinan Gereja dan Agama*

Di era Otsus, para pimpinan Gereja bersama dengan pimpinan Agama lain bergerak lebih maju dalam menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM demi menciptakan Papua yang lebih aman dan damai. Hal ini didasari dari pandangan teologi Teosentris bahwa perdamaian merupakan kerinduan setiap orang apapun agamanya. Bahkan agama-agama mengajarkan dan berupaya menciptakan damai atau syalom bagi

---

78 Tindakan ini merupakan wujud dari harapan Gereja Universal yang dirumuskan dalam Konsili Vatikan II terutama dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia dewasa ini, *Gaudium Et Spes*: Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga (GS,1).

79 Wawancara dengan Theo van den Broek (mantan kepala SKP Jayapura) pada 29 Juli 2017 di rumahnya dok 9-angkasa Jayapura, pukul 09.00 -11.00 WIT.

80 SKP setelah ditangani oleh Ordo Fransiskan (OFM) Papua dirubah namanya menjadi "Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua" untuk melihat dan menangani perdamaian secara lebih utuh yakni damai dengan Tuhan, manusia dan alam ciptaan.

manusia dan dunia. Agama menginginkan manusia hidup berdampingan secara damai dengan sesama yang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan.<sup>81</sup> Namun kerinduan terdalam itu menjadi rusak karena konflik yang terjadi akibat keegoisan manusia untuk saling menguasai satu dengan yang lain. Dan masyarakat Papua sedang mengalami itu sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, 1969 sampai pasca reformasi bahkan sampai sekarang ini, 2018. Itulah yang mendorong para pimpinan Gereja dan Agama di Papua bersatu dan berjuang untuk menciptakan damai di Papua. Menurut Uskup Leo pada tahun-tahun awal reformasi (1998-2000) tindakan kekerasan, pelanggaran hukum dan HAM yang banyak terjadi di masyarakat mendorong para pimpinan Gereja bersatu dan bersuara bersama-sama untuk laporan kasus kekerasan dan seruan serta himbuan demi penegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Maka pada awal 2002 dibentuklah forum Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP). Anggota dari persekutuan ini adalah Gereja Katolik Keuskupan Jayapura dan Persekutuan Gereja-gereja Protestan wilayah Papua yaitu PGI, PGPI dan PII.<sup>82</sup> Persekutuan ini dibentuk dengan tujuan atau visi bersama yakni menjadikan “Papua Tanah Damai” dengan tiga pokok perhatian. *Pertama*, membahas hal-hal aktual dalam masyarakat dan menentukan sikap. *Kedua*, mencari cara kerja sama dengan pemerintah dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat sesuai dengan visi khusus kami. *Ketiga*, membangun hubungan dan persahabatan antara kami sendiri dan antar umat sebagai perwujudan nyata dari damai sejahtera yang disampaikan oleh semua orang.<sup>83</sup>

Menyadari visi damai milik semua orang dan diperjuangkan bukan hanya oleh Kristianitas tetapi oleh semua agama maka para pimpinan Gereja (Katolik keuskupan Jayapura dan Kristen: PGI, PGPI dan PII) bersama pimpinan Agama agama di Papua (Islam, Budha, Hindu) membentuk Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA) pada

---

81 Pentingnya dialog agama-agama untuk menemukan titik temu perjuangan keselamatan umat manusia secara bersama, Lih. Paul F.Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal. 286-287.

82 Tukan, 2009, hal. 204-105.

83 Peluang pelanggaran HAM semakin besar, dimana ketika reformasi terjadi di Indonesia dan masyarakat Papua mulai mengekspresikan kebebasannya dalam tuntutan hak penentuan nasib sendiri melalui demonstrasi yang sudah tentu akan berbenturan dengan aparat keamanan. Maka, para pimpinan Gereja juga bekerjasama dengan pihak LSM untuk mengadvokasi atas tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM serta pernyataan-pernyataan baik untuk mendukung dan memprotes pemerintah dan aparat keamanan maupun untuk meneguhkan umat dan masyarakat dalam menuntut keadilan, damai dan keamanan (Tukan, 2009, hal. 75). Kemudian tindak lanjut dari kerja sama itu, menurut Theo van den Broek mencoba bekerjasama dengan gereja GKI lalu mendirikan ELSHAM. Tujuan supaya kasus-kasus itu bisa ditangani secara bersama sehingga gaungnya semakin besar, lihat dalam (SKP, 2006, hal. 92-93).

2006. Menurut uskup Leo yang menjadi visi dari FKPPA adalah “membangun Papua Tanah Damai”. Di mana damai itu bukan hanya tidak adanya perang dan konflik tetapi adanya kenyamanan dan kesejahteraan hidup bersama dalam relasi yang baik, bersahabat dan harmonis baik dengan Sang Pencipta, dan dengan manusia maupun dengan seluruh alam ciptaan-Nya.<sup>84</sup> Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana para pimpinan Gereja dan agama bersatu padu menyuarkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua? Para pemimpin Gereja dan agama ini tampaknya lebih memilih metode konsultatif ketika ada masalah dengan pihak-pihak terkait dan himbauan bersama dalam mencegah konflik. Sementara penyelesaian segala macam masalah yang terjadi secara komprehensif diajukan diselesaikan melalui dialog nasional.<sup>85</sup> Lagi-lagi muncul pertanyaan sejauh mana cara itu efektif merendam kasus pelanggaran HAM yang lima tahun terakhir ini cukup memprihatinkan? Situasi di lapangan memperlihatkan bahwa cara yang ditempuh para pimpinan Gereja dan Agama itu tidak membantu banyak dalam mengatasi konflik Papua yang melahirkan ribuan kasus pelanggaran HAM. tampaknya itulah yang melatarbelakangi tiga pimpinan Gereja di Papua: GIDI, KINGMI dan BAPTIS menarik diri dari PGGP dan membentuk “Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua” untuk bersuara lebih tegas.<sup>86</sup> Selain itu, suara enam uskup yang tergabung dalam Komite Eksekutif Konferensi Uskup Katolik Oseania menuntut negara-negara Pasifik untuk tidak menghambat keinginan rakyat Papua bergabung dalam *Melanesian Spearhead Groups*, MSG.<sup>87</sup> Uskup Agung Port Moresby, Mgr. John Ribat MSC (kini dipilih menjadi Kardinal PNG oleh Paus Fransiskus) menyerukan agar pimpinan MSG sungguh-sungguh mempertimbangkan permohonan orang Papua melalui ULMWP. Menurutnya, Indonesia juga dilibatkan dalam MSG sebagai observer supaya masalah HAM Papua dibahas dalam kerangka MSG. Seruan-seruan para uskup Pasifik itu merupakan wujud keprihatinan Gereja Katolik Pasifik terhadap situasi Papua di satu sisi dan pentingnya solusi yang lebih komprehensif di pihak lain melalui dialog damai.

---

84 Tukan, 2009, hal. ix.

85 Neles Tebay K, *Bersama Sama Mencari Solusi Untuk Papua Damai: Bunga Rampai Dialog Perdamaian Papua Tahun 2013-2017*, Yogyakarta: Institute For Inter-Faith Dialogue In Indonesia (Interfidei), 2017, hal. 224.

86 Gembala Kaum Tertindas: Kejahatan, Kekerasan, dan Kehancuran Masih Penuhi Tanah Papua, <https://suarapapua.com/2017/10/27/gembala-kaum-tertindas-kejahahatan-kekerasan-dan-kehancuran-masih-penuhi-tanah-kami/>. Diakses pada 28 Januari 2018.

## Dialog Papua-Jakarta demi Perdamaian Papua

Atas keprihatinan dari gereja-gereja bersama agama-agama di Papua, visi “Papua Tanah Damai” mulai dikampanyekan secara lebih strategis oleh Jaringan Damai Papua (JDP) yang dibentuk oleh Pater Dr. Neles Tebay bekerja-sama dengan pihak LIPI bersama almarhum Dr. Muridan.<sup>88</sup> Kini seruan dialog Papua-Jakarta sudah didengarkan secara luas oleh publik Indonesia terutama kaum akademisi maupun di lingkungan *Religion for Peace* (RFP) Internasional.<sup>89</sup> Terbitnya buku “100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua”, Juli 2013 adalah wujud meluasnya dukungan dialog demi perdamaian Papua karena Papua dilihat masih bermasalah dan karenanya perlu solusi penyelesaian masalah. Dua guru besar berlatar belakang Katolik yang satu ahli etika, Prof. Magnis Suseno dan yang lain ahli postmodern, Prof. Bambang Sugiharto dalam buku tersebut mengungkapkan keprihatinan atas situasi Papua yang dituntut segera mencari jalan penyelesaiannya. Dialog dilihat sebagai cara yang paling beradab dan demokratis bahkan sejalan dengan semangat dasar negara, Pancasila. Dialog Papua dan Jakarta dilihat suatu kemendesakan karena Papua merupakan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia yang semakin kian menjadi nanah yang memalukan di hadapan publik Internasional kritik dua filsuf itu.<sup>90</sup> Meskipun tidak persis jelas mekanismenya, pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah mengakui dan mengiyakan komitmennya menyelesaikan masalah Papua melalui dialog terbuka pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). “Dialog diantara pemerintah pusat dengan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk mencari solusi dan opsi guna mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua saat membuka rapat kabinet di kantor Presiden Jakarta, 09/11/2011).”<sup>91</sup> Di bawah pemerintahan Jokowi usulan dialog menjadi semakin jelas namun mengerucut pada dialog sektoral. Pada 18 Agustus 2017, 14 orang perwakilan Papua baik dari pihak Gereja, akademisi, LSM, maupun tokoh adat termasuk Pater Neles Tebay bertemu Presiden Jokowi di istana Presiden, Jakarta. Dalam pertemuan itu Jokowi menunjuk Pater

---

87 Eben E. siadari, “Federasi Uskup Pasifik Minta Papua Tidak Dihambat Masuk MSG”, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/federasi-uskup-pasifik-minta-papua-tidak-dihambat-masuk-msg>. Diakses pada 27 Januari 2018.

88 Lih. Tebay, 2017, hal. 218-219

89 *Ibid.*, hal. ix.

90 Lih. Elga J. Sarapung, *100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua*, Yogyakarta: Interfidei, 2013, hal. 23, 266.

91 Lihat Neles K. Tebay, *Angkat Pena Demi Dialog Papua: Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta-Papua Tahun 2001-2011*, Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2012, hal. iv; Bdk. Tebay, 2017, hal. 197-200.

Neles sebagai penanggung jawab dialog sektoral bersama Jenderal Wiranto selaku menteri Kemendagri serta pak Tanten Marsduki selaku kepala staf kepresidenan untuk mempersiapkan dialog yang dimaksud.<sup>92</sup> Namun niat baik pemerintah menyelesaikan masalah Papua melalui dialog sektoral mendapat penolakan secara luas oleh masyarakat Papua yang menginginkan dialog politik yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Bagi mereka dialog sektoral tidak dapat menyelesaikan akar persoalan yang membuat Papua berkonflik sejak 1962-sekarang. Memang dapat dimengerti penolakan oleh masyarakat Papua terutama organ-organ perjuangan Papua merdeka yang bersatu dalam wadah persatuan yang disebut *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) karena wacana dialog yang ditawarkan JDP sejak awal bukan dialog sektoral. JDP masih menyertakan OPM sebagai mitra dialog yang perlu dilibatkan bersama 8 aktor yang lain. Namun ketika dialog mengerucut pada dialog sektoral yang akan didialogkan adalah persoalan kesejahteraan masyarakat Papua baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, maka secara otomatis aktor dasar yang berseberangan selama ini "OPM" dapat tersingkir.<sup>93</sup> ULMWP meskipun secara organisasi persatuan perjuangan belum menyatakan penolakan dialog sektoral yang dimaksud pemerintah pusat, namun secara pribadi beberapa anggota ULMWP menyatakan sikap menolak seperti Buktar Tabuni ketua PNWP dan dewan komite ULMWP, Andy Ayamiseba dewan komite dari faksi WPNCL. Viktor Yeimo ketua KNPB yang juga anggota tim kerja ULMWP di dalam negeri menegaskan bahwa ULMWP tidak berjuang untuk dialog dengan pemerintah Indonesia tetapi mendorong hak penentuan nasib sendiri.<sup>94</sup>

Meskipun tawaran dialog sektoral menjadi prokotra diantara masyarakat Papua yang menginginkan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum atau pun perundingan dengan pemerintah Indonesia, namun masih ada harapan kalau tujuan utama dari perjuangan itu adalah untuk kebebasan dan perdamaian secara utuh sebagaimana yang diperjuangkan oleh Gereja yakni damai dengan Tuhan, sesama manusia

---

92 Neles Tebay, *Dialog Sektoral: Apakah Itu?*, <https://suarapapua.com/2017/09/12/dialog-sektoral-papua-apaakah-itu/>. Diakses pada 28 Januari 2018.

93 Meskipun masyarakat Papua yang pro merdeka menolak secara tegas tawaran dialog sektoral oleh pemerintah pusat, namun Pater Neles Tebay dalam artikelnya "Menuju Dialog Tentang Papua: Sebuah Perspektif Orang Papua", sejak awal sudah menegaskan bahwa ini merupakan suatu tahapan awal menuju dialog politik dalam mengatasi konflik Papua yang berkepanjangan (Tebay, 2012, hal. 68-69). Maka dialog sektoral itu bukanlah akhir dalam menyelesaikan persoalan Papua, namun itu merupakan langkah awal yang perlu disambut oleh masyarakat Papua.

94 Viktor Yeimo, *Cara Menyikapi Dialog Sektoral*, <https://suarapapua.com/2017/09/15/cara-menyikapi-dialog-sektoral/>. Diakses pada 28 Januari 2018.

dan alam ciptaan-Nya. Hal ini akan sejalan dengan apa yang dicetuskan oleh Gereja dan agama-agama di Papua dalam visi “Papua Tanah Damai” di mana semua orang apapun latar belakang hidup aman, damai dan sejahtera dalam satu pulau yang disebut Papua kalau dialog sektoral itu kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belapihak dan diwujudkannyakannya secara konsisten. Meskipun dapat diakui secara mekanisme berat karena prinsip dialog yang dimaksud Gereja yakni soal pengakuan, penghargaan, serta kesetaraan<sup>95</sup> tidak dapat terjadi kalau dialog itu tetap *top down* tanpa duduk sama tinggi sama rendah sebagaimana halnya dengan pemberian otonomi khusus. Kekonsistenan dalam implementasi penting mengingat pemberian otonomi khusus, 2001 yang merupakan *win win solution* aspirasi rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri diwakili oleh tim 100 kepada presiden Habibie, 1999 sampai sekarang implementasinya tidak jelas bahkan dapat dikatakan gagal. Itulah sebabnya harapan besar dalam dialog sektoral itu adalah bahwa mesti ada jaminan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan supaya apa yang dicita-citakan terutama perdamaian secara menyeluruh itu dapat diwujudkannyatakan demi Papua damai.

### **Gerakan Kaum Muda Papua: Tantangan Eksistensi Gereja Katolik Papua**

Semenjak tiga organisasi perlawanan perjuangan Papua merdeka yakni *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP) dan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) bersatu dalam organ koordinatif *United Liberated Movement for West Papua* (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, 19 Desember 2015, pergerakan kaum muda Papua dibawah koordinasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB)<sup>96</sup> semakin menguat.<sup>97</sup> Dengan diterimanya ULMWP sebagai observer pada pertemuan puncak di Honiara, Solomon Iland, Juni 2015 sub-regional MSG yang beranggotakan negara Vanuatu, Solomon Island, Fiji, PNG dan FNKLS, orang Papua merasa jalan penentuan nasib sendiri semakin terbuka. Bahkan diangkatnya isu Papua di dalam Pasifik Island Forum (PIF) pada pertemuan tahunan yang ke-

---

95 Pentingnya membangun perdamaian tanpa kekerasan juga ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II ketika melakukan kunjungan ke Irlandia, 29 September 1979 bahwa perdamaian tidak bisa dibangun dengan perang dan kekerasan. Perdamaian tidak bisa diwujudkan dengan iklim teror, intimidasi maupun kematian. Tindakan kekerasan hanya menipu dan menyangkal kebenaran baik itu kebenaran iman maupun kebenaran kemanusiaan; Lih. Cahyadi Krispurwana T, *Yohanes Paulus II, Gereja, Teologi dan Kehidupan*. Jakarta:Obor, 2007, hal.330.

96 Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dibentuk pada tahun 2008.

97 Lihat dalam Haluk, 2016, hal. 7-8.

47 pada 7-11 September 2017 di Port Moresby, Papua Newguenea semakin menambah semangat kaum muda dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri.<sup>98</sup> Sebagai bentuk dukungan dan syukur atau penerimaan dan pembahasan masalah pelanggaran HAM Papua, beberapa kali dibawah koordinasi KNPB digelar sejumlah kegiatan berupa ibadah syukur, seminar, maupun mimbar terbuka. Beberapa kegiatan terpaksa dibubarkan oleh pihak keamanan dengan alasan yang lazim yakni kegiatannya bertentangan dengan hukumNKRI.<sup>99</sup>

Munculnya sikap militansi perjuangan kaum muda Papua dalam mendukung perkembangan politik yang terjadi di kawasan Pasifik dan kemudian di forum PBB pada 2016<sup>100</sup> di satu pihak dan diperketatnya ruang gerak oleh pihak keamanan di pihak lain, banyak menimbulkan kontak fisik yang berakibat pada pelanggaran HAM. Markus Haluk seorang aktivis Papua dalam laporan “Papua di Ambang Kepunahan” memperlihatkan selama tahun 2008-2015 terjadi sebanyak 15 kasus penangkapan, penculikan, penembakan dan pembunuhan. Dari hasil pantauan *Human Rights Watch*, situasi penegakkan HAM di Papua disimpulkan semakin kacau. Pihak keamanan masih melakukan tindakan kekerasan tanpa dapat dijerat sesuai hukum yang berlaku. Dan beberapa peristiwa yang mengundang perhatian publik nasional bahkan Internasional ialah penembakan empat pelajar Sekolah Menengah Umum (SMU) dan seorang warga di Paniai pada 8 Desember 2014. Selain itu penangkapan 500-an pemuda dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi damai mendukung masuknya ULMWP pada forum MSG selama Maret-Juni 2015. Juga ada penembakan warga sipil dan belasan luka tembak di Kabupaten Tolikara pada Juli 2015 oleh aparat keamanan.<sup>101</sup> Salah satu kasus yang membuat Uskup Timika, Mgr. Jonh Pilip Saklil, Pr angkat bicara adalah penembakan 3 warga sipil di Kabupaten Deiyai pada 9 Agustus 2017 di mana satu orang meninggal dan dua lainnya luka-luka. Mgr. Saklil mengirimkan surat peringatan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Gubernur Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih dengan empat tuntutan.<sup>102</sup> Ini semua merupakan data pelanggaran HAM yang terjadi

---

98 Tebay, 2017, hal. 118-119, 132-133.

99 Lihat dalam Aventinus Jenaru OFM dkk, 2017, hal. 16-23.

100 Pada sidang umum PBB, Septmber 2016 ada 7 negara Pasifik (Vanuatu, Solomon Iland, Nauru, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Marshal dan Palau), mengangkat masalah Papua terutama soal pelanggaran HAM (Tebay, 2017, hal. 184).

101 Lih. Haluk, 2015, hal. 6-9; Bdk. Aventinus Jenaru OFM dkk, 2017, hal. 17-22, 86-91; Bdk. Tebay, 2017, hal. 230-231.

102 Hasil investigasi lengkap yang menjadi acuan dari surat terbuka Uskup Timika: Perilaku kejahatan yang mengancam kemanusiaan secara lengkap dapat dilihat dalam (Suara

akibat menguatnya sikap politik yang berbeda antara orang Papua yang ingin menentukan nasib sendiri dengan pemerintah Indonesia yang berusaha merendahkan tuntutan itu melalui wakilnya, *pihak keamanan sejak persoalan Papua mengemukakan di wilayah Pasifik dan kemudian dalam sidang umum PBB 2016 dan 2017.*

Fakta-fakta kemajuan politik orang Papua tiga tahun belakangan ini (2014-2017) yang didukung kuat oleh gerakan kaum muda Papua akan semakin menantang eksistensi Gereja Katolik sebagai pembawa misi perdamaian dan perwujudan Kerajaan Allah di Papua. Mengapa? Karena pertentangan antara dua pihak yang berseberangan semakin menguat. Di satu sisi orang Papua merasa kedudukan secara politik semakin sederajat dengan pemerintah Indonesia di meja MSG meskipun masih sebatas Observer sementara posisi pemerintah Indonesia sebagai anggota luar biasa.<sup>103</sup> Namun fakta itu tidak pernah dan tidak akan diakui oleh pemerintah karena bagi pemerintah ULMWP yang diklaim orang Papua sebagai wadah politik yang resmi hanya mewakili orang Papua yang di pengasingan (di luar negeri). Perbedaan persepsi serta menguatnya posisi tawaran di pihak masyarakat Papua semakin mengancam timbulnya korban pelanggaran HAM di Papua. Itulah sebabnya, Gereja Katolik bersama Gereja dan agama lain di Papua selain terus mengkampanyekan “Papua Tanah Damai” namun mesti bergerak lebih jauh dan lebih realistis sesuai dengan dinamika perkembangan politik dan pelanggaran HAM yang terjadi. Tulisan artikel guru besar STFT “Fajar Timur”, Prof. Dr. Nico Syukur Dister, OFM dengan topik “Peranan Gereja Katolik Terhadap Situasi Papua” mesti menjadi satu acuan bagi Gereja-gereja di Papua dalam menyingkapi posisi Gereja dan keberpihakan kepada keadilan, kebenaran dan hak-hak pihak korban secara jelas dan tegas.<sup>104</sup> Dalam artikel itu, Pater Nico selain memberikan pencerahan terhadap posisi Gereja dalam kaitan dengan politik, dimana

---

Papua.Com, Surat Terbuka Uskup Timika: Perilaku Kejahatan yang Mengancam Kemanusiaan, <https://suarapapua.com/2017/09/02/surat-terbuka-uskup-timika-perilaku-kejahatan-yang-mengancam-kemanusiaan/>. Diakses pada 28 Januari 2018.

103Tebay, 2017, hal. 117.

104Tiga pimpinan Gereja, GIDI, BAPTIS dan KINGMI yang tergabung dalam “Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua” bersuara yang lebih tegas. Pimpinan ketiga Gereja ini menyampaikan kepada jemaat bahwa –mengingat begitu banyak peristiwa kekerasan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua (termasuk kejadian beberapa hari terakhir ini) – “tidak ada masa depan bagi bangsa Papua dalam sistemnya Indonesia. Mereka juga menyuarakan suara kenabian kepada pemerintah pusat atas sejumlah hal yang mengawatirkan terhadap umat Tuhan di Papua yang dirangkum dalam 5 hal (Suara Papua.Com, Forum Oikumenis Gereja Papua: Tidak Ada Masa Depan Orang Papua dalam Sistem Indonesia, <https://suarapapua.com/2017/06/02/forum-oikumenis-gereja-papua-tidak-ada-masa-depan-orang-papua-dalam-sistem-indonesia/>. Diakses pada 27 Januari 2018.

menurutnya Gereja memang tidak berurusan dengan politik karena itu adalah urusan para politisi. Namun baginya Gereja akan kehilangan relevansi kalau mengambil jarak terlalu jauh dengan persoalan masyarakat yang didalamnya terdapat persoalan politik. Artinya Gereja selain hadir memberikan penerangan bagi kaum awam yang terlibat dalam politik dengan ajaran-ajarannya, namun sikap keberpihakan terhadap keadilan dan kebenaran serta pihak korban mesti jelas dan tegas disuarakan:

Bila wakil Gereja-gereja lain bersuara tegas dan keras dalam mengemban tugas kenabian, orang bertanya: "Di manakah suara Gereja Katolik?" Suara itu sering tidak terdengar, karena para petinggi dan tokoh Gereja Katolik seringkali lebih suka berbicara dalam pertemuan skala kecil dengan petinggi negara, tentara dan polisi sebagai pihak yang berwenang serta bertanggungjawab. Pembicaraan semacam itu mereka anggap akan lebih berhasil daripada bicara vokal dihadapan umum. Lagi pula mereka memandang diri sebagai pembangun jembatan antara kedua pihak yang berseberangan itu. Tetapi patut dipertanyakan apakah percakapan pribadi semacam itu lebih besar efektivitasnya daripada protes vokal, yang gema dan kumandangnya terdengar melalui media. Memburuknya situasi hak asasi manusia Papua terasa sekali selama paruhan pertama tahun 2017. Berhadapan dengan kenyataan ini, pendekatan ala Gereja Katolik rasanya tidak begitu efektif. Agar Gereja juga di masa sekarang betul-betul dapat berperan sebagai nabi, maka baik umat maupun pimpinannya mesti sangat vokal dalam mengajukan protes keras terhadap setiap kasus pelanggaran HAM, sambil -di satu sisi- menaruh hormat pada pandangan politik umat dan masyarakat, entah pro-[NK] RI entah pro "M", dan di sisi yang lain menjelaskan mengapa aspirasi-M memang wajar, lebih-lebih bila diperjuangkan secara *ahimsa*.<sup>105</sup>

## PENUTUP

Panggilan Gereja Katolik adalah melaksanakan misi Keselamatan Allah bagi manusia di dunia. Maka apapun situasi dan kondisinya, Gereja mesti dapat mengusahakan sedapat mungkin untuk terlibat dalam misi Allah menyelamatkan manusia dari dosa dan kejahatan dunia. Gereja Katolik Papua sedang melaksanakan misi keselamatan itu ditengah konflik Papua antara orang Papua yang pro merdeka "M" dengan pemerintah Indonesia yang diwakili pihak keamanan mempertahankan Papua tetap dalam NKRI. Di tengah konflik itu, Gereja Katolik hadir untuk membawa misi perdamaian dengan mengupayakan dialog dengan semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah daerah, pimpinan militer maupun kerja sama dengan gereja-gereja dan agama-agama di Papua. Gereja

---

105Tulisan Prof. Dr. Nico Dister, OFM ini selain dipublikasikan oleh SKPKC Fransiskan Papua, 2 Juni 2017 juga dipublikasikan ulang oleh Suara Papua.Com, dan Satu Harapan. Com (20 Juli 2017) bahkan oleh Berita Kauskupan Jayapura (BKJ).

bermain pada poros tengah. Artinya Gereja tidak berpihak kepada masyarakat Papua yang pro "M" maupun pemerintah Indonesia yang berupaya keras mempertahankan Papua dalam NKRI dengan kekerasan. Yang Gereja mau dan perjuangkan adalah terciptanya damai di Papua baik dengan Sang Pencipta (Tuhan), dengan sesama manusia maupun alam ciptaan-Nya.

Namun peran Gereja Katolik di poros tengah itu dirasa belum cukup oleh sejumlah pihak terutama oleh orang Papua yang berada pada pihak korban. Kalau Gereja dipanggil untuk menciptakan damai yang merupakan wujud dari terciptanya Kerajaan Allah, maka Gereja diharapkan lebih berpihak kepada keadilan, kebenaran dan hak-hak asasi manusia. Sambil mengakui karya misi besar Gereja Katolik di Papua baik dalam aspek pewartaan iman maupun kehidupan kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, Gereja Katolik diharapkan bersuara lantang terkait pembelaan terhadap HAM supaya Gereja sungguh-sungguh hadir seperti yang diamanatkan oleh Konsili Vatikan II atas bisikan Roh Kudus yang dengan jelas dan tega dirumuskan dalam *Gaudium et Spes* "Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga (GS,1)."

\* **Meki Mulait**

Mahasiswa Program Pascasarjana-Program Magister Ilmu Teologi di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Jl. Nias 2, Bandung 40117. E-mail: [mulaitm@ymail.com](mailto:mulaitm@ymail.com)

## BIBLIOGRAFI

- Boff Leonardo. *Yesus Kristus Pembebas*. Ende: Alnoldus, 1999.
- Broek van den Theo. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi*. Tim SKP Jayapura, 2006.
- Cahyadi Krispurwana T. *Yohanes Paulus II, Gereja, Teologi dan Kehidupan*. Jakarta: Obor, 2007.
- Drooglevers P. J. *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Dulles Avery. *Model Model Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- ..... *The Catholicity of the Church*. New York: Oxford University Press, 1986.
- Gonggong Anhar. *Mgr. Albertus Soegijapranata Antara Gereja dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1993.
- Haluk Markus. *Papua Di Ambang Kepunahan*. Jayapura: Sekretariat Tim

- Kerja ULMWP, 2015.
- ..... *Jalan Panjang ULMWP dari MSG ke PIF*. Jayapura: Sekretariat Tim Kerja ULMWP, 2016.
- Jacobs Tom. *Gereja Menurut Vatikan II*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Jenaru Aventinus, dkk. *Papua di Ambang Kehancuran: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia Di Papua 2016*. Sentani: SKPKC Fransiskan Papua, 2017.
- Sloot Jan. *Fransiskan Masuk Papua Jilid I: Periode Pemerintahan Belanda 1937-1962*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2012.
- Fuellenbach John. *Kerajaan Allah: Pesan Inti Ajaran Yesus Bagi Dunia Modern*. Ende: Nusa Indah, 2006.
- Kristiyanto Eddy A. *Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua*. Jakarta: Obor, 2017.
- ..... *Spiritualitas Sosial Suatu Kajian Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Knitter F. Paul. *Pengantar Teologi Agama-Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Mardiatmadja S.B. *Eklesiologi Makna dan Sejarahnya*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Martasudjita E. *Sakramen-Sakramen Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- McBrien.P.R. *Do We Need the Church*. New York: Harper & Row, 1969.
- ..... *Church: The Continuing Ques*, 1970.
- Muridan S. Widjojo. *Papua RoadMap*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Otmar Oehring. *Human Rights Droits l'Homme Menschenrechte*. Lembaga Misi Katolik Internasional Missio, 2009.
- Pannenberg. *Theology and the Kingdom of God*. Philadelphia: Westminster, 1969.
- Sarapung Elga J. *100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua*. Yogyakarta: Interfidei, 2013.
- Seng S. Choan. *Jesus & the Reign of God*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Subanar G. Budi . *Kilasan Kisah Soegijapranata*. Yogyakarta: USD, 2012.
- Suseno Frans Magnis. *Iman dan Hati Nurani: Gereja Berhadapan dengan Tantangan Tantangan Zaman*. Jakarta: Obor, 2014.
- Tebay K. Neles. *Angkat Pena Demi Dialog Papua: Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta-Papua Tahun 2001-2011*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2012.
- ..... *Bersama Sama Mencari Solusi Untuk Papua Damai: Bunga Rampai Dialog Perdamaian Papua Tahun 2013-2017*. Yogyakarta: Institute For Inter-Faith Dialogue In Indonesia (Interfidei), 2017.

- Tukan Peter, *Membangun Papua Tanah Damai: Kumpulan Ceramah Uskup Leo Laba Ladjar*, Jayapura: Sekretariat Keuskupan Jayapura, 2009.
- WidiArtanto. *Menjadi Gereja Misioner*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius, 1997.
- Woga Edmund. *DasarDasar Misiologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sekretariat KJ. *Membangun Gereja Mandiri Yang Misioner: Arah Umum Pengembangan Keuskupan Jayapura 2006-2016*, Sekretariat KJ, 2006.
- John Paul II, *Redemptoris Missio*, 13.